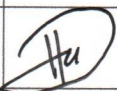




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat
Tahun 2024

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Dani Muhamad Yanuar	Penyusun Rencana dan Pelaporan	20 /1/2025	
2	Dikonsep	Gilang Adi Subagja, S.A.P	Penyusun Rencana dan Pelaporan	20 /1/2025	
3	Diperiksa	Danny Irawan Siswoyo, S.SiT	Kepala Subbagian Tata Usaha	21 /1/2025	
8	Disetujui	Hanuara Kelana I, A.Md.LLAJ., S.Sos., S.H., M.M.	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa barat	23 /1/2025	



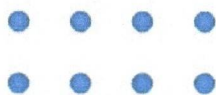
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II JAWA BARAT



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP 2024

BPTD KELAS II JAWA BARAT

Jalan Leuwipanjang, Kelurahan Situsaeur,
Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung



Bptd_jabar



Bptdjabar



Bptdjabar



Bptdjabar@Gmail.com

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Barat Tahun 2024 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan Tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Draft Rencana Strategis BPTD Kelas II Jawa Barat Tahun 2020-2024 dengan total jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 12 (Dua belas) dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2024, BPTD Kelas II Jawa Barat telah melaksanakan dengan sangat baik. Dengan hasil 12 (Dua belas) indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$).

Hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran kegiatan yaitu sebesar 150%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan sangat baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi BPTD Kelas II Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana yang telah dirumuskan dalam draft Rencana Strategis BPTD Kelas II Jawa Barat Tahun 2020-2024.

KATA PENGANTAR



Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Barat yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional.

Sebagai instansi pemerintah yang mandiri, BPTD Kelas II Jawa Barat juga perlu untuk menyusun sebuah Laporan Monitoring Capaian Kinerja sebagai acuan dan tolak ukur pengukuran kinerja setiap triwulanan, adapun untuk posisi triwulan IV menjadi sebuah Laporan Kinerja secara keseluruhan di akhir tahun. Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPTD Kelas II Jawa Barat Tahun 2024 sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya sebagai alat untuk melakukan pengukuran keberhasilan tingkat kinerja yang dihasilkan selama triwulan berjalan sebagai acuan pelaksanaan kinerja tahun 2024 maupun laporan kinerja selama periode 1 (satu) tahun.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Unit Eselon I, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam periode tahunan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPTD Kelas II Jawa Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Bandung, 13 Januari 2025

**Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat,**



**HANUARA KELANA IRIANA, A.Md. LLAJ., S.Sos., M.M.
NIP. 19670516 198903 1 012**

DAFTAR ISI

	RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
	KATA PENGANTAR.....	ii
	DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	I.1 Latar Belakang.....	1
	I.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
	I.3 Sumber Daya Manusia.....	5
	I.4 Potensi, Isu, Strategis dan Permasalahan.....	6
	I.4.1 Kewenangan.....	6
	I.4.2 Sumber Daya Manusia.....	7
	I.4.3 Anggaran.....	7
	I.4.4 Isu Strategis.....	7
	I.4.5 Ruang Lingkup.....	8
	I.5 Sistematika Pelaporan.....	8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	13
	II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	13
	II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	15
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
	III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja.....	19
	III.2 Pengukuran Capaian Kinerja.....	19
	A. SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Atarmoda Transportasi.....	22
	A.1. IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.....	22
	A.1.1 Definisi Indikator Kinerja.....	22
	A.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024..	23
	A.1.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	24
	A.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	25
	A.2 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi	26
	A.2.1 Definsi Indikator Kinerja.....	26
	A.2.2 Perbandungan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024...	26
	A.2.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	27
	A.2.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	28
	A.3 IKK.1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kepirintisan Angkutan Penyeberangan.....	28

	A.3.1	Definisi Indikator Kinerja.....	28
	A.3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024..	28
	A.3.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	29
	A.3.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	30
A.4	IKK.1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi.....	30
	A.4.1	Definisi Indikator Kinerja.....	30
	A.4.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024..	31
	A.4.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	31
	A.4.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	33
B.	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat.....	33
	B.1	IKK.2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A.....	33
	B.1.1	Definisi Indikator Kinerja.....	33
	B.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024..	34
	B.1.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	35
	B.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	36
	B.2	IKK.2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A.....	36
	B.2.1	Definisi Indikator Kinerja.....	36
	B.2.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024..	37
	B.2.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	37
	B.2.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	38
	B.3	IKK.2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP.....	39
	B.3.1	Definisi Indikator Kinerja.....	39
	B.3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024..	40
	B.3.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	40
	B.3.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	41
C.	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat.....	42
	C.1	IKK.3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal.....	42
	C.1.1	Definisi Indikator Kinerja.....	42

C.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024..	43
C.1.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	44
C.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	44
C.2	IKK.3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.....	45
C.2.1	Definisi Indikator Kinerja.....	45
C.2.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024..	46
C.2.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	46
C.2.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	47
C.3	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan.....	48
C.3.1	Definisi Indikator Kinerja.....	48
C.3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024..	48
C.3.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	49
C.3.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	49
D.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	50
D.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	50
D.1.1	Definisi Indikator Kinerja.....	50
D.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024..	50
D.1.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	51
D.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	52
E.	SK 6 Meningkatnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	52
E.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	52
E.1.1	Definisi Indikator Kinerja.....	52
E.1.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024.	52
E.1.3	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	53
E.1.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang.....	54
III.3	Realisasi Anggaran.....	54
III.3.1	Alokasi Anggaran Tahun 2024.....	54
III.3.2	Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	60
III.3.3	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana.....	64

III.3.4	Hambatan dan Kendala.....	64
BAB IV	PENUTUP.....	65
IV.1	Penutup.....	65
IV.1.1	Ringkasan Capaian.....	65
IV.2	Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab.....	66

LAMPIRAN

- 1 Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024
- 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 3 Rencana Aksi Tahun 2024
- 4 Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2024
- 5 Revisi Rencana Aksi I Tahun 2024
- 6 Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024
- 7 Revisi Rencana Aksi II Tahun 2024
- 8 Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu instansi pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global.

Sebagai salah satu Unit Kerja Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional.

BPTD Kelas II Jawa Barat sebagai instansi pemerintah yang mandiri juga perlu untuk menyusun LKIP sebagai acuan dan tolok ukur pengukuran kinerja sertiap tahunnya. Penyusunan LKIP oleh BPTD Kelas II Jawa Barat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja BPTD Kelas II Jawa Barat Tahun 2024 sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya sebagai alat untuk melakukan pengukuran keberhasilan tingkat kinerja yang dihasilkan sebagai acuan pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan datang.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Unit Eselon I, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam periode triwulanan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPTD Kelas II Jawa Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

I.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal Barang untuk umum, unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas, dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan Terminal Tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;
 - c. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
 - e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat; dan
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Kerangka Kelembagaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPTD Kelas II dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, subbagian, satuan pelayanan, dan kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan kearsipan, dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian Terminal Tipe A, Terminal Barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran

pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

5. Satuan Pelayanan

Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian dan/atau seluruh tugas pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal Barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengendalian dan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Data sumber daya manusia pada satuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat per tanggal 31 Desember 2024 meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 299 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan) orang dan Pegawai Pemerintah (PPPK) Sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) Orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 437 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh) orang. Alokasi jumlah pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), untuk masing-masing satuan pelayanan dan kantor induk sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI			
		PNS	P3K	PPNPN	JUMLAH
A	Kantor Induk	51	8	35	94
B	Satpel Terminal				
	1. TTA Harjamukti – Cirebon	18	3	19	40
	2. TTA Indihiang – Tasikmalaya	22	3	21	46
	3. TTA KH. Ahmad Sanusi - Sukabumi	15	1	37	53
	4. TTA Ciakar – Sumedang	10		24	34
	5. TTA Guntur Melati – Garut	23	2	37	62
	6. TTA Banjar	19	1	30	50
	7. TTA Cikampek	4	4	9	17
	8. TTA Subang	7	1	24	32
	9. TTA Kertawangunan – Kuningan	11	1	17	39
	10.TTA Leuwipanjang – Bandung	23	6	46	75
C	Satpel UPPKB				0
	1. UPPKB Balonggandu – Karawang	16	3	20	39
	2. UPPKB Losarang – Indramayu	12	4	24	40

	3. UPPKB Kemang - Bogor	17	7	10	34
	4. UPPKB Tomo – Sumedang	14	3	15	32
	5. UPPKB Gentong – Tasikmalaya	16	3	18	37
	6. UPPKB Cibaragalan - Purwakarta	8	1	12	21
	7. UPPKB Bojong - Cianjur (belum beroperasi)				
D	Wilayah Kerja TSDP				
	1. Satuan Pelayanan Cirata	5		9	14
	2. Satuan Pelayanan Saguling	3		4	10
	3. Satuan Pelayanan Jatiluhur	1		9	7
	4. Satuan Pelayanan Panjalu	1		11	12
	5. Satuan Pelayanan Pangandaran	3		6	9
	TOTAL	299	51	437	787

Tabel I.1 Komposisi Pegawai BPTD JABAR Tahun 2024

Sumber : Pengelola Kepegawaian (Posisi 31 Desember 2024)

I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

I.4.1. Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) *Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009*

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;

- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

I.4.2. Sumber Daya Manusia

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terutama dalam rangka penunjang pelaksanaan tupoksi sejalan dengan program kinerja yang ingin diwujudkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

I.4.3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I.4.4. Isu Strategis

Isu Strategis BPTD Kelas II Jawa Barat adalah:

1. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
2. Pengoperasian Terminal Penumpang;
3. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
4. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
5. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
6. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
7. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
8. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
9. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal Tipe A dan UPPKB serta Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan.
10. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

I.4.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2024 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Kegiatan
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I.5 SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
- II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2024
 - Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- III.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - A. **SK1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT DAN KETERPADUAN ANTARMODA TRANSPORTASI**
 - Uraian Sasaran Kegiatan
 - A.1. **IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan**

- A.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.2. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi

- A.2.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.2.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.2.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.3. IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

- A.3.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.3.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.3.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.4. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

- A.4.1 Definisi Indikator Kinerja
- A.4.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.4.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B. SK2 MENINGKATNYA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT

• Uraian Sasaran Kegiatan

B.1. IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

- B.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- B.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B.2. IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

- B.2.1. Definisi Indikator Kinerja

- B.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- B.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B.3. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP

- B.3.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- B.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C. SK4 MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

• **Uraian Sasaran Kegiatan**

C.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.2. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

- C.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.3. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

- C.3.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

D. SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

• **Uraian Sasaran Kegiatan**

D.1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- D.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- D.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- D.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- D.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

E. SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

- **Uraian Sasaran Kegiatan**

E.1. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

- E.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- E.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- E.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- E.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

III.3 Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- Refocusing Anggaran Tahun 2024
- Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024
- Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2018 – 2024

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3.4. Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup

IV.1.1. Ringkasan Capaian

IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
3. Rencana Aksi Tahun 2024;
4. Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2024;
5. Revisi Rencana Aksi I Tahun 2024;
6. Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024;
7. Revisi Rencana Aksi II Tahun 2024;
8. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat Tahun 2024 sesuai draft Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat 2020-2024.

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100%
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90%
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
		IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

- Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan BPTD Wilayah Kelas II Jawa Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra BPTD Tahun 2020-2024, dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan dan tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dalam perkembangannya Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 BPTD Kelas II Jawa Barat mengalami penambahan terutama dalam hal penambahan sasaran kegiatan yang tercantum berdasarkan hasil perumusan revisi manual Indikator Kinerja Utama BPTD dan penyusunan draft rencana strategis Tahun 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100%
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100%

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
SK1	Meningkatnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

II.2 URAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Dalam perkembangannya, Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya seiring adanya revisi manual Indikator Kinerja Utama yang berlaku di lingkungan BPTD dengan rincian sebagai berikut :

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100%
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90%
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
		IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 7.038.965.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 56.511.986.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 57.999.561.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 5.937.500.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 225.000.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.418.931.000
7.	Program Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 36.754.270.000
	TOTAL	Rp. 170.886.213.000

- Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024

Dikarenakan adanya pergantian Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan adanya perubahan pagu anggaran terakhir di BPTD Kelas II Jawa Barat, maka pada tanggal 02 Desember 2024 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja.

Adapun rincian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90%
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90%
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100%
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
SK6	Meningkatnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Program Infrastruktur Konektifita	Rp.	179.049.642.000
2.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	28.703.927.000
3.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	76.117.906.000
4.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	63.198.191.000
5.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	11.029.618.000
6.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	50.114.111.000
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	6.987.638.000
8.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	43.126.473.000
	TOTAL	Rp.	229.163.753.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

III.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-Performance* yang menyediakan fasilitas inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan secara mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada umumnya serta Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat pada khususnya, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- **Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2024**

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan target dan realisasi kinerja terhadap perjanjian kinerja 2024, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja BPTD Kelas II Jawa Barat, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 12 (dua belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dari total 12 (sembilan belas) indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis BPTD, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target revisi perjanjian kinerja dengan capaian BPTD Kelas II Jawa Barat maka diperoleh data Capaian Kinerja adalah sebesar **100,00 %**. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kegiatan sebagaimana tampak pada tabel berikut :

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024	TW I			TW II			TW III			TW IV			CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II	CAPAIAN TW III	CAPAIAN TW IV
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C				
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar Moda Transportasi					100%			100%			100%			100%	64%	83%	92%	100%
IKK 1.1	Persentase Keperintisan Angkutan Jalan	%	90	25	25	100%	60	60	100%	75	75	100%	90	90	100%	28%	67%	83%	100%
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi	Lokasi	10	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	100%	100%	100%	100%
IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Layanan Keperintisan Angkutan Penyebrangan	%	90	25	25	100%	60	60	100%	75	75	100%	90	90	100%	28%	67%	83%	100%
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	15	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	100%	100%	100%	100%
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat					100%			100%			100%			100%	25%	75%	85%	100%
IKK 2.1	Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	%	100	25	25	100%	75	75	100%	85	85	100%	100	100	100%	25%	75%	85%	100%
IKK 2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	100	25	25	100%	75	75	100%	85	85	100%	100	100	100%	25%	75%	85%	100%
IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan	%	100	25	25	100%	75	75	100%	85	85	100%	100	100	100%	25%	75%	85%	100%
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat					67%			67%			100%			100%	17%	37%	79%	100%
IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90	20	20	100%	60	60	100%	70	70	100%	90	90	100%	22%	67%	78%	100%
IKK 3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35	10	10	100%	15	15	100%	21	21	100%	35	35	100%	29%	43%	60%	100%
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Darat	Orang	100	0	0	0%	0	0	0%	100	100	100%	100	100	100%	0%	0%	100%	100%
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					100%			100%			100%			100%	94%	94%	94%	100%
IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	85	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	85	85	100%	94%	94%	94%	100%
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					100%			100%			100%			100%	94%	94%	94%	100%
IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan darat	Nilai	85	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	85	85	100%	94%	94%	94%	100%
Rata-rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						100%			93%			100%			100%	59%	77%	89%	100%
Rata-rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						157%			150%			100%			100%	108,12%	129,66%	150,00%	100,00%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang Lebih Besar Atau Sama Dengan 100% (IKP > 100%)						11			11			12			12	2	2	1	0
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan Kurang dari 100% (IKP < 100%)						1			1			0			0	10	10	11	12

A. SK1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT dan KETERPADUAN ANTARMODA TRANSPORTASI

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan salah satu direktorat di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Barat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya wilayah Provinsi Jawa Barat. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui BPTD dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh BPTD Kelas II Jawa Barat adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. IKK 1.1.Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan;
2. IKK 1.3.Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi;
3. IKK 1.5.Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyebrangan.
4. IKK 1.6.Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

A.1 IKK1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

A.1.1 Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan subsidi angkutan jalan perintis berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019. Ada dua kriteria untuk menetapkan angkutan jalan perintis, yaitu faktor finansial dan faktor keterhubungan.

Kriteria faktor finansial berupa tingkat kemampuan daya beli masyarakat untuk aksesibilitas angkutan antardaerah masih rendah, trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah.

Sedangkan kriteria faktor keterhubungan dapat berupa menghubungkan wilayah terisolasi dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum, menghubungkan daerah terpencil, terluar, dan tertinggal dengan wilayah yang sudah terbangun di wilayah Indonesia, melayani

daerah yang terkena dampak bencana alam, dan melayani perpindahan penumpang dari Angkutan penyeberangan perintis atau Angkutan udara perintis.

Dalam hal pelayanan Angkutan Jalan Perintis untuk angkutan orang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki trayek tetap dan teratur;
- b. Sifat pelayanan tidak boleh terhenti;
- c. Tidak bersinggungan dengan trayek yang sudah dilayani oleh angkutan umum lainnya;
- d. Lokasi keberangkatan dan kedatangan berupa terminal, halte, atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda;
- e. Mencantumkan informasi trayek dan tarif pada terminal atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda;
- f. Memberikan pelayanan angkutan paling sedikit 1 keberangkatan dalam setiap hari; dan
- g. Menyediakan kendaraan cadangan paling sedikit 10% dari jumlah kendaraan yang dioperasikan.

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dengan satuan ukur persentase digunakan rumus sebagai berikut :

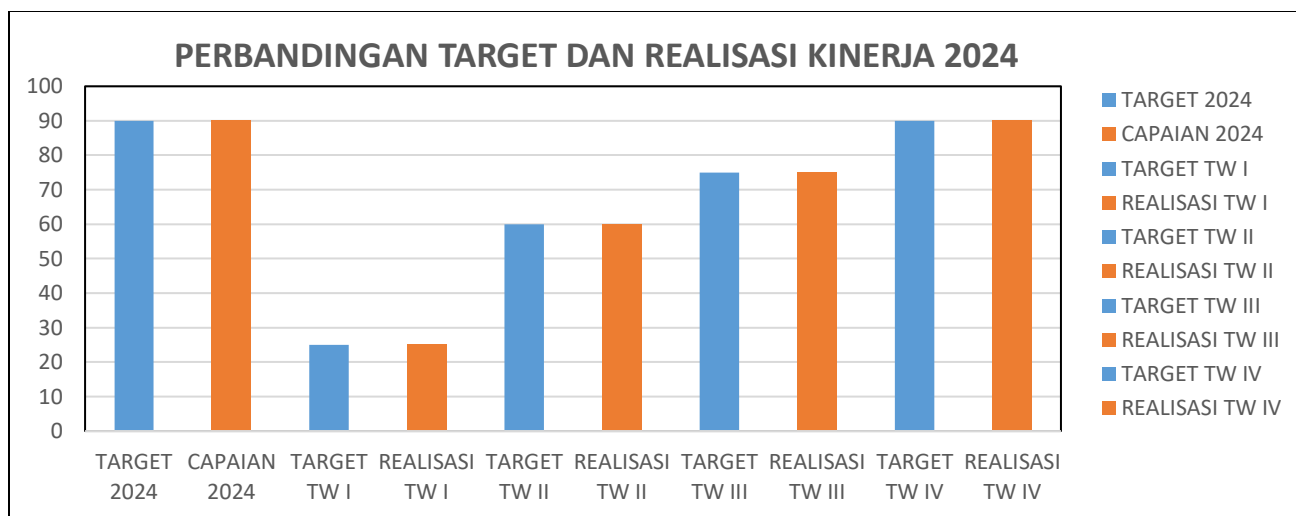
$$= \frac{\text{Jumlah RIT Realisasi pada Tahun 2024}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya

A.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 sebesar 90% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%.

Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.1. Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
90	100	25	25	60	60	75	75	90	100

A.1.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.DRJD 3385 Tahun 2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024, sebanyak 338 trayek ditetapkan untuk dilayani Angkutan Jalan Perintis.

Hakekat pemberian subsidi bagi angkutan perintis adalah lokasi pelayanan untuk menghubungkan antara daerah terisolir, terpencil dan tertinggal. Di lokasi tersebut pula tidak ada penyelenggaraan layanan transportasi lainnya dan secara aspek bisnis belum atau tidak menguntungkan.

Melalui penyelenggaraan angkutan jalan perintis diharapkan dapat mengembangkan potensi perekonomian daerah. Keberadaan bus keperintisan sangat penting dan diharapkan oleh masyarakat di daerah pedalaman yang belum terjangkau sarana transportasi umum secara optimal.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 memiliki persentase capaian sebesar 99,99% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2024 didukung dengan kegiatan Layanan Angkutan Jalan Perintis berupa pemberian subsidi angkutan keperintisan di wilayah Bandung dan Bogor berdampak pada terlayannya

aksesibilitas transportasi darat yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang dilalui trayek angkutan perintis.

Dari layanan pelaksanaan keperintisan angkutan jalan di wilayah Bandung dan Bogor Tahun 2024 diketahui bahwa :

$$\begin{array}{rcl}
 & \text{Jumlah RIT Realisasi s/d TW IV} & \\
 & 18.902 \text{ RIT} & \times 100\% \\
 = & \frac{\quad}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} & \\
 & 37.966 \text{ RIT} &
 \end{array}$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 yaitu sebesar 80%. Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebanyak Rp. 9.733.264.927,- dari total pagu sebesar Rp. 9.733.268.000,- atau sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Subsidi Angkutan Keperintisan Bandung dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 6.264.279.000,- dan realisasi s/d mencapai Rp. 6.264.278.115,- atau 100%
2. Subsidi Angkutan Keperintisan Bogor dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 3.468.989.000,- dan realisasi s/d mencapai Rp. 3.468.986.812,- atau ,100 %.

A.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang baik ini, namun BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan melalui :

1. Pemberian subsidi bagi angkutan perintis yang melayani masyarakat di daerah pedalaman yang belum terjangkau sarana transportasi umum secara optimal (pengusulan rute baru);
2. Terus berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang dilalui oleh rute angkutan keperintisan;
3. Melaksanakan monitoring efektifitas pelaksanaan angkutan jalan perintis secara mandiri.

A.2. IKK.1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi

A.2.1 Definisi Indikator Kinerja

Terminal Tipe-A yang beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Sedangkan, Terminal Barang yang beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani Angkutan Barang di jalan.

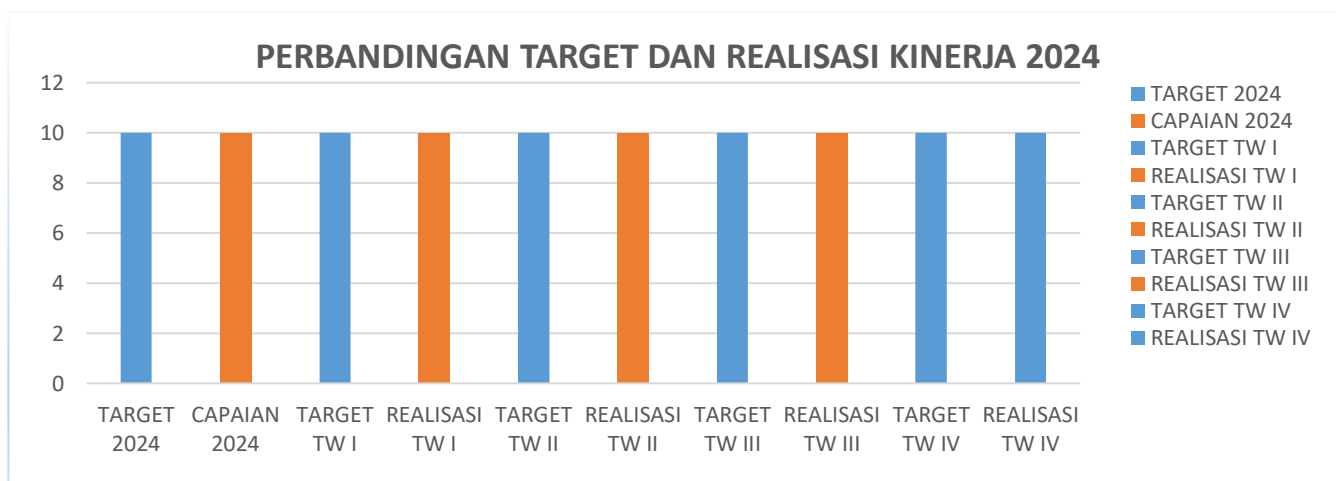
Terminal tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi dengan satuan ukur jumlah lokasi digunakan rumus sebagai berikut :

= Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi

2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2024 sebanyak 10 Lokasi dengan persentase sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebanyak 10 Lokasi dengan persentase sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.3. Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

A.2.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas II Jawa Barat memiliki 10 Terminal Tipe-A yang beroperasi.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 3 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi pada Tahun 2024 didukung dengan kegiatan operasional layanan Terminal Tipe-A yang melayani para penumpang yang ingin menggunakan jasa layanan kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan atau Angkutan Lintas Batas Negara, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota dan Perdesaan.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2024 memiliki persentase capaian sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebanyak Rp. 29.088.307.818,- dari total pagu sebesar Rp. 29.458.610.000,- atau sebesar 98,74 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Operasional Terminal Banjar dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.786.666.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.786.591.397,- atau 100%;
2. Operasional Terminal Indihiang (Tasikmalaya) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.922.360.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.922.302.681,- atau 100%;
3. Operasional Terminal Guntur Melati (Garut) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.703.171.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.703.072.095,- atau 100%;
4. Operasional Terminal Subang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.791.467.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.791.401.006,- atau 100%;
5. Operasional Terminal Sudirman (Sukabumi) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.576.973.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.573.868.820,- atau 100%;
6. Operasional Terminal Ciakar (Sumedang) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.831.619.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.831.480.144,- atau 99,99%;
7. Operasional Terminal Kertawangunan (Kuningan) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.595.652.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.595.574.273,- atau 100%;

8. Operasional Terminal Harjamukti (Cirebon) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.290.559.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.290.375.719,- atau 99,99%;
9. Operasional Terminal Cikampek dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.405.710.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.405.623.265,- atau 99,99%;
10. Operasional Terminal Leuwipanjang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 6.054.433.000,- dan realisasi mencapai Rp. 5.868.350.549,- atau 93,92%.

A.2.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2024 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang sangat memuaskan ini, BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan operasionalisasi Terminal Tipe A secara optimal. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan baik melalui revitalisasi/rehabilitasi maupun peningkatan sarana prasarana pendukung layanan Terminal.

1. Perbaikan penyelenggaraan operasional Terminal Tipe A baik berupa dukungan sarana dan prasarananya maupun peningkatan kualitas pelayanannya;
2. Melaksanakan perbaikan sistem informasi Terminal baik berupa ticketing online, maupun informasi keberangkatan dan kedatangan Bus dari Terminal secara online;
3. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk naik Bus di Terminal.

A.3. IKK.1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

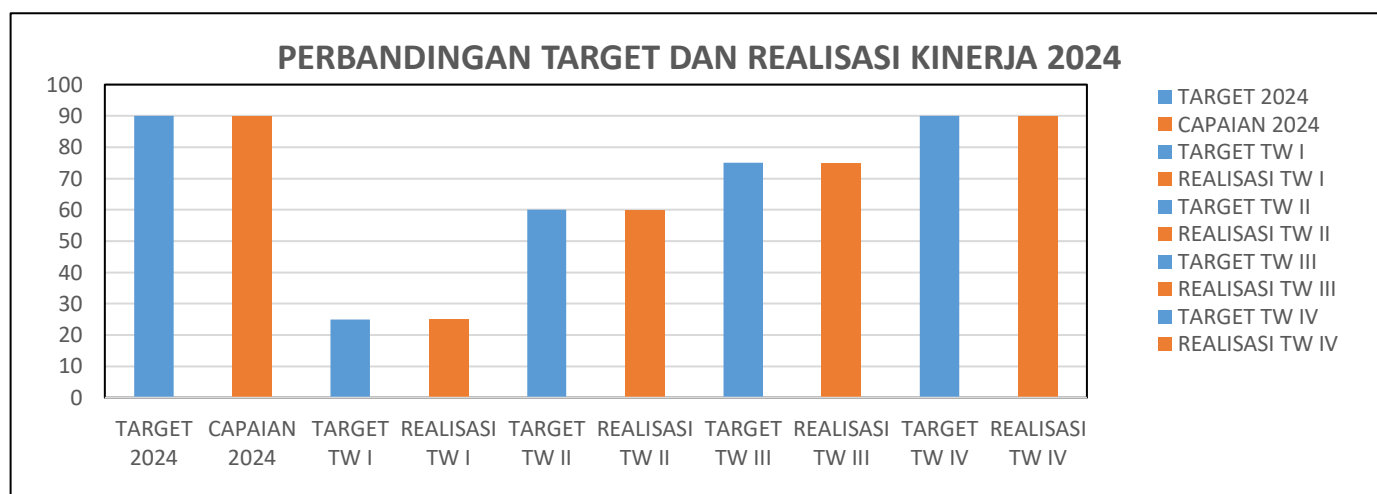
3.1 Definisi Indikator Kinerja

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar.

3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan SDP Tahun 2024 sebesar 90% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 90%, maka capaian kinerja mencapai 100%.

Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.1. Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan SDP adalah sebagai berikut:



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
90	100	25	25	60	60	75	75	90	100

A.3.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, serta munculnya anggaran kegiatan Tahun 2024 pada DIPA/POK BPTD Kelas II Jawa Barat. Untuk Tahun 2024 BPTD Kelas II Jawa Barat memiliki tugas

Hakekat pemberian subsidi bagi angkutan perintis adalah lokasi pelayanan untuk menghubungkan antara daerah terisolir, terpencil dan tertinggal. Di lokasi tersebut pula tidak ada penyelenggaraan layanan transportasi lainnya dan secara aspek bisnis belum atau tidak menguntungkan.

Melalui penyelenggaraan angkutan jalan perintis diharapkan dapat mengembangkan potensi perekonomian daerah. Keberadaan bus keperintisan sangat penting dan diharapkan oleh masyarakat di daerah pedalaman yang belum terjangkau sarana transportasi umum secara optimal.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan SDP Tahun 2024 memiliki persentase capaian sebesar 99,99% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan SDP pada Tahun 2024 didukung dengan kegiatan Layanan Angkutan SDP berupa pemberian subsidi angkutan Layanan Keperintisan di Ro ro Long Distance Ferry Patimban – Banjarmasin dan Patimban - Pontianak berdampak pada terlayannya aksesibilitas transportasi darat yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang dilalui trayek angkutan perintis.

Dari layanan pelaksanaan keperintisan angkutan jalan di di Ro ro Long Distrance Ferry Patimban – Banjarmasin dan Patimban -Pontianak Tahun 2024 diketahui bahwa :

$$\begin{array}{rcl}
 & \text{Jumlah RIT Realisasi s/d TW IV} & \\
 & 18.902 \text{ RIT} & \times 90\% \\
 = & \frac{\quad}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} & \\
 & 37.966 \text{ RIT} &
 \end{array}$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan SDP Tahun 2024 yaitu sebesar 80%. Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan SDP Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebanyak Rp. 16.123.727.808,- dari total pagu sebesar Rp. 16.123.728.000,- atau sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Subsidi Angkutan Keperintisan di Ro ro Long Distrance Ferry Patimban – Banjarmasin dan Patimban -Pontianak dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 16.123.728.000,- dan realisasi s/d mencapai Rp. 16.123.727.808,- atau 100%

A.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan SDP Tahun 2024 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang baik ini, namun BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan keperintisan SDP melalui :

4. Pemberian subsidi bagi angkutan perintis yang melayani masyarakat di daerah pedalaman yang belum terjangkau sarana transportasi secara optimal
5. Terus berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang dilalui oleh rute angkutan keperintisan;
6. Melaksanakan monitoring efektifitas pelaksanaan SDP perintis secara mandiri.

A.4 IKK.1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

A.4.1 Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan

umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan.

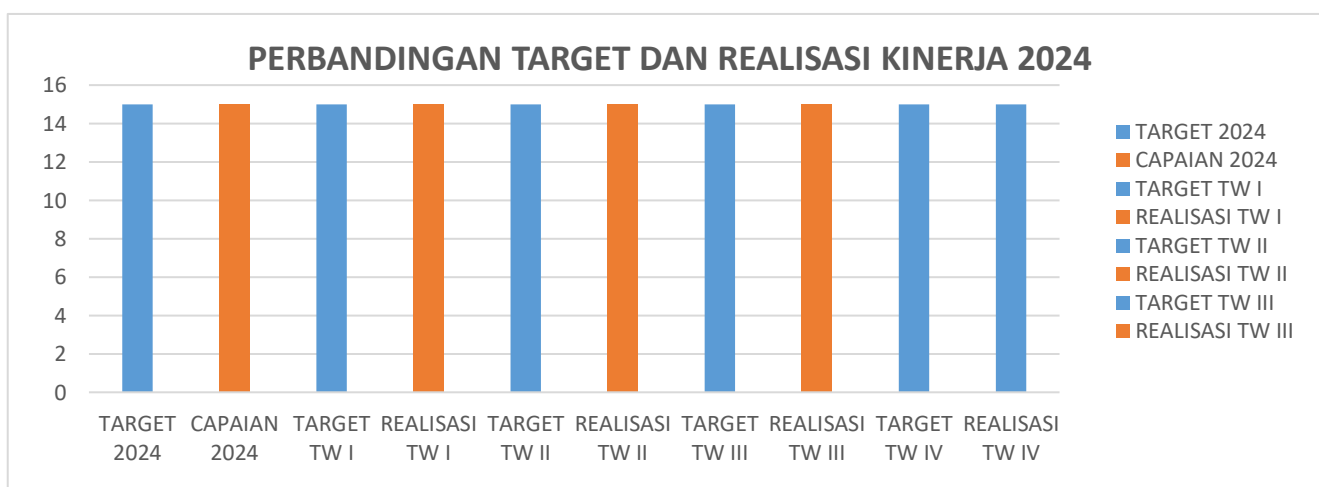
Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi dengan satuan ukur jumlah lokasi digunakan rumus sebagai berikut :

= Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun (n)

A.4.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024 terdapat target kinerja atas indikator kinerja kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebanyak 15 Lokasi dengan capaian sebanyak 15 Lokasi wilayah kerja, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.6. Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

A.4.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, serta munculnya anggaran kegiatan Tahun 2024 pada DIPA/POK BPTD Kelas II Jawa Barat. Untuk Tahun 2024 BPTD

Kelas II Jawa Barat memiliki tugas untuk operasional Pelabuhan Penyeberangan di sebanyak 1 lokasi.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2024 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2024 didukung dengan kegiatan operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di 15 Lokasi yang berada di Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2024 memiliki persentase capaian sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun Anggaran 2024, per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebanyak Rp. 3.505.006.911,- dari total pagu sebesar Rp. 3.505.207.000,- atau sebesar 99,99 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Dermaga Maroko, Bunder, Ranca Ririp dan Cililin dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 564.855.000,- dan realisasi mencapai Rp. 564.803.600,- atau 99,99%;
2. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Dermaga Jangari, Leuwiorok, Kebon Coklat, Ciputri, Cilincing dan Babakan Garut (Waduk Cirata) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 830.322.000,- dan realisasi mencapai Rp. 830.264.460,- atau 99,99%;
3. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Servis Jatiluhur, Tanggul Usman Banyu Biru, Parang Gemlong dan Galumpit dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 806.296.000,- dan realisasi mencapai Rp. 806.269.001,- atau 100%;
4. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Majingklak, Kalipucang, Pamorotan dan Cijulang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 674.640.000,- dan realisasi mencapai Rp. 674.576.950,- atau 99,99%;
5. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Situ Panjalu, Situ Gede dan Waduk Darma dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 629.094.000,- dan realisasi mencapai Rp. 629.092.900,- atau 100%;

Dengan dimulainya penerapan pengawasan pelayanan di 15 Lokasi wilayah kerja TSDP maka pada Tahun 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat memiliki Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi walaupun untuk saat ini status pelabuhannya masih dibawah otoritas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang realisasinya pada Tahun 2024 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100%.

A.4.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Pada Tahun 2024 ini, kegiatan lingkup TSDP telah didukung dengan anggaran operasionalisasi pengawasan pelayanan untuk 15 lokasi/wilayah kerja. Tentunya ke depan besar harapannya untuk terus kami tingkatkan pelayanannya dengan dukungan anggaran yang bukan hanya operasional pengawasannya namun juga pembangunan Pelabuhan penyeberangannya.

Dari hasil capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2024 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang cukup memuaskan ini, BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan operasionalisasi Pelabuhan SDP secara optimal. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan baik melalui revitalisasi/rehabilitasi maupun peningkatan sarana prasarana pendukung layanan Pelabuhan SDP.

1. Perbaikan penyelenggaraan operasional Pelabuhan SDP baik berupa dukungan sarana dan prasarananya maupun peningkatan kualitas pelayanannya;
2. Melaksanakan perbaikan sistem informasi Pelabuhan SDP baik berupa ticketing online, maupun informasi keberangkatan dan kedatangan;
3. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait keselamatan pelayaran Pelabuhan penyeberangan.

B. SK2 MENINGKATNYA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. IKK 2.1. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A;
2. IKK 2.2. Persentase penerapan SMART terminal tipe-A;
3. IKK 2.3. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP.

B.1 IKK.2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A

B.1.1 Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan.

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dengan satuan ukur persentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi Standar Pelayanan}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

B.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A Tahun 2024 target sebesar 100% dengan capaian 100%. Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
100	100	25	25	75	75	85	85	100	100

B.1.3 Analis Keberhasilan dan Kegagalan

Sesuai PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A pada Tahun 2024 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100%, dimana hal ini ditunjukkan dengan berbagai peningkatan kualitas pelayanan di masing-masing terminal Tipe-A di bawah naungan BPTD Kelas II Jawa Barat.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2024 memiliki persentase capaian sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun Anggaran 2024, 31 Desember 2024 telah terealisasi sebanyak Rp. 29.088.307.818,- dari total pagu sebesar Rp. 29.458.610.000,- atau sebesar 98,74 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Operasional Terminal Banjar dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.786.666.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.786.591.397,- atau 100%;
2. Operasional Terminal Indihiang (Tasikmalaya) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.922.360.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.922.302.681,- atau 100%;
3. Operasional Terminal Guntur Melati (Garut) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.703.171.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.703.072.095,- atau 100%;
4. Operasional Terminal Subang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.791.467.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.791.401.006,- atau 100%;
5. Operasional Terminal Sudirman (Sukabumi) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.576.973.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.573.868.820,- atau 100%;
6. Operasional Terminal Ciakar (Sumedang) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.831.619.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.831.480.144,- atau 99,99%;
7. Operasional Terminal Kertawangunan (Kuningan) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.595.652.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.595.574.273,- atau 100%;
8. Operasional Terminal Harjamukti (Cirebon) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.290.559.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.290.375.719,- atau 99,99%;
9. Operasional Terminal Cikampek dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.405.710.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.405.623.265,- atau 99,99%;
10. Operasional Terminal Leuwipanjang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 6.054.433.000,- dan realisasi mencapai Rp. 5.868.350.549,- atau 93,92%.

B.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang sangat memuaskan ini, BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Terminal Tipe-A secara optimal. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan baik melalui revitalisasi/rehabilitasi maupun peningkatan sarana prasarana pendukung layanan Terminal.

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang baik ini, namun BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kualitas pelayanan Terminal Tipe A melalui beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan penyelenggaraan operasional Terminal Tipe A baik berupa dukungan sarana dan prasarananya maupun peningkatan kualitas pelayanannya;
2. Melaksanakan perbaikan sistem informasi Terminal baik berupa *ticketing online*, maupun informasi keberangkatan dan kedatangan Bus dari Terminal secara *online*;
3. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk naik Bus di Terminal.

B.2 IKK.2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

B.2.1 Definisi Indikator Kinerja

Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A merupakan perbandingan antara persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang melaporkan operasional secara online (bobot 50%) ditambah dengan persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang dipasang terdiri atas 7 (tujuh) item, yaitu : *vending machine*, *passenger barrier gate*, *vehicle barrier gate*, *CCTV*, *counting passenger*, *information display*.

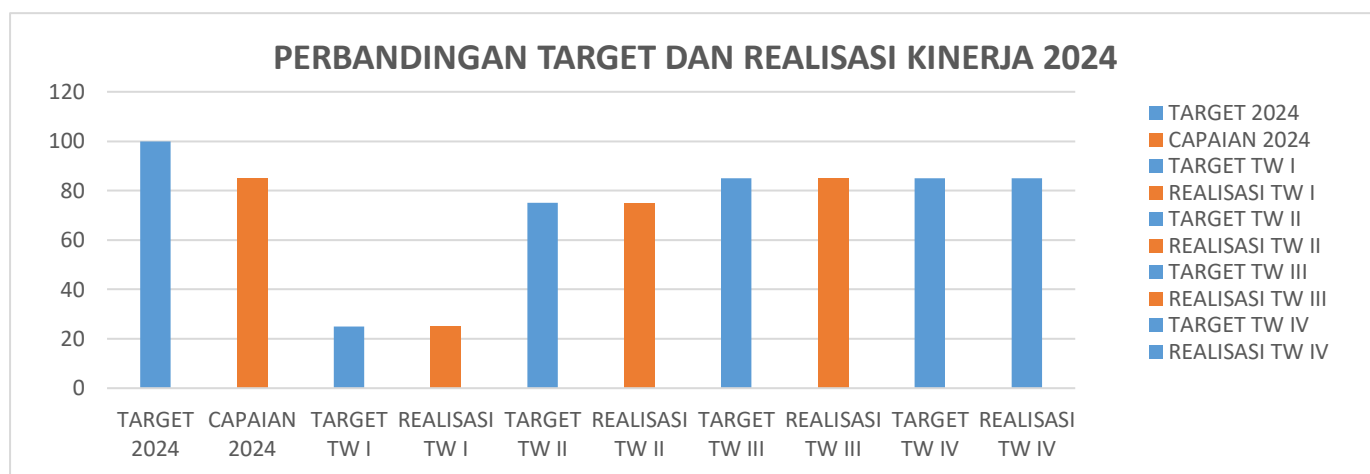
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A dengan satuan ukur persentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase TTA Online} = \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasionalnya secara online}}{\text{Jumlah Terminal Beroperasi}} \times 100\%$$

$$= (\text{Persentase TTA Online} \times 50 \%) + (\text{Persentase TTA yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal})$$

B.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.8. Grafik Capaian IKK Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
100	100	25	25	75	75	85	85	100	100

B.2.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sesuai PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Tahun 2024 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100%, dimana hal ini ditunjukkan dengan berbagai peningkatan kualitas pelayanan di masing-masing terminal Tipe-A di bawah naungan BPTD Kelas II Jawa Barat.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2024 memiliki persentase capaian sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun Anggaran 2024, 31 Desember 2024 telah terealisasi sebanyak Rp. 29.088.307.818,- dari total pagu sebesar Rp. 29.458.610.000,- atau sebesar 98,74 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Operasional Terminal Banjar dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.786.666.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.786.591.397,- atau 100%;
2. Operasional Terminal Indihiang (Tasikmalaya) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.922.360.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.922.302.681,- atau 100%;
3. Operasional Terminal Guntur Melati (Garut) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.703.171.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.703.072.095,- atau 100%;
4. Operasional Terminal Subang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.791.467.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.791.401.006,- atau 100%;
5. Operasional Terminal Sudirman (Sukabumi) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.576.973.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.573.868.820,- atau 100%;
6. Operasional Terminal Ciakar (Sumedang) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.831.619.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.831.480.144,- atau 99,99%;
7. Operasional Terminal Kertawangunan (Kuningan) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.595.652.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.595.574.273,- atau 100%;
8. Operasional Terminal Harjamukti (Cirebon) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.290.559.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.290.375.719,- atau 99,99%;
9. Operasional Terminal Cikampek dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.405.710.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.405.623.265,- atau 99,99%;
10. Operasional Terminal Leuwipanjang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 6.054.433.000,- dan realisasi mencapai Rp. 5.868.350.549,- atau 93,92%.

B.2.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang sangat memuaskan ini, BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Terminal Tipe-A secara optimal. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan baik melalui revitalisasi/rehabilitasi maupun peningkatan sarana prasarana pendukung layanan Terminal.

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 202 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang sangat memuaskan ini, namun BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kualitas pelayanan Terminal Tipe A melalui beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan penyelenggaraan operasional Terminal Tipe A baik berupa dukungan sarana dan prasarananya maupun peningkatan kualitas pelayanannya;

2. Melaksanakan perbaikan sistem informasi Terminal baik berupa *ticketing online*, maupun informasi keberangkatan dan kedatangan Bus dari Terminal secara *online*;
3. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk naik Bus di Terminal.

BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A melalui Pembiayaan Operasional Terminal Tipe-A yang dikelola, Pelayanan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A berdampak pada terlaksananya pelayanan transportasi darat yang memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Barat dengan upaya peningkatan pelayanan berupa modernisasi sistem pelayanan transportasi darat (pengembangan sistem informasi berbasis internet dan penerapan pelayanan berbasis teknologi) di tahun-tahun yang akan datang.

B.3 IKK.2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di

Pelabuhan SDP

B.3.1 Definisi Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-API, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan.

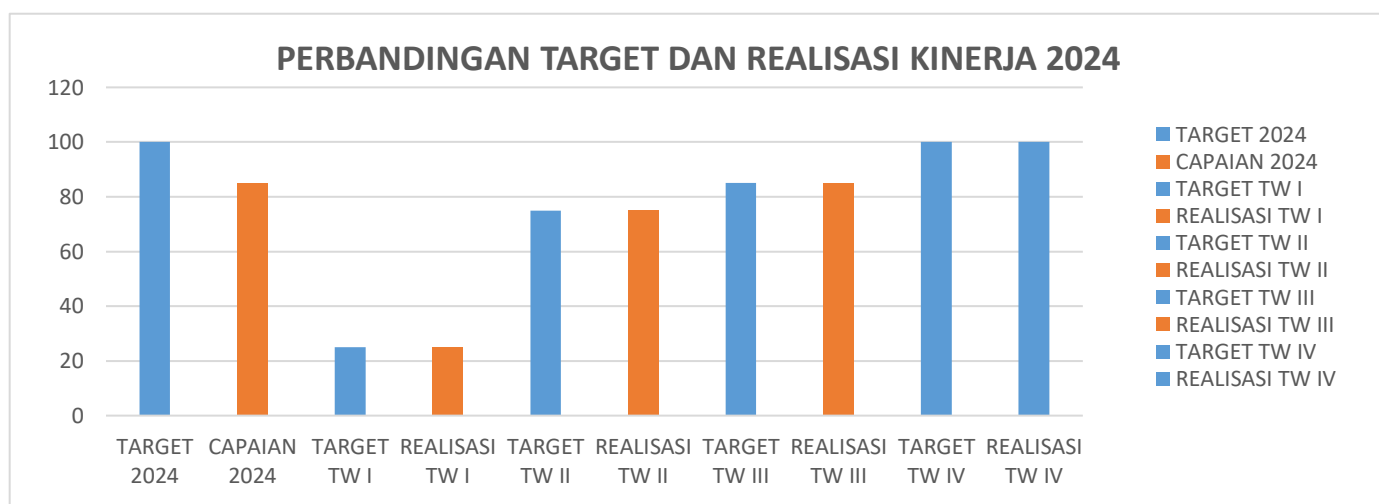
Selanjutnya, diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dengan satuan ukur persentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang dipantau}} \times 100\%$$

B.3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.9. Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP



TARGET 2023	CAPAIAN 2023	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
100	85	25	25	75	75	85	85	100	100

B.3.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sesuai PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan, hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan yang memiliki standar pelayanan minimum Pelabuhan penyeberangan, namun mulai Tahun 2024 ini pemantauan SPM mulai digencarkan dengan melibatkan BPTD. Untuk BPTD Kelas II Jawa Barat sendiri saat ini tengah diamanatkan 15 lokasi wilayah kerja Pelabuhan penyeberangan untuk dipantau secara langsung SPM Pelabuhan Penyeberangannya meskipun saat ini statusnya masih tercatat sebagai UPT di bawah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP didukung dengan kegiatan Pembiayaan Operasional Pengawasan Wilayah Kerja TSDP.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{6}{15} \times 100\%$$

Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun Anggaran 2024, per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebanyak Rp. 3.505.006.911,- dari total pagu sebesar Rp. 3.505.207.000,- atau sebesar 99,99 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Dermaga Maroko, Bunder, Ranca Ririp dan Cililin dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 564.855.000,- dan realisasi mencapai Rp. 564.803.600,- atau 99,99%;
2. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Dermaga Jangari, Leuwiorok, Kebon Coklat, Ciputri, Cilincing dan Babakan Garut (Waduk Cirata) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 830.322.000,- dan realisasi mencapai Rp. 830.264.460,- atau 99,99%;
3. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Servis Jatiluhur, Tanggul Usman Banyu Biru, Parang Gemlong dan Galumpit dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 806.296.000,- dan realisasi mencapai Rp. 806.269.001,- atau 100%;
4. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Majingklak, Kalipucang, Pamorotan dan Cijulang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 674.640.000,- dan realisasi mencapai Rp. 674.576.950,- atau 99,99%;
5. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Situ Panjalu, Situ Gede dan Waduk Darma dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 629.094.000,- dan realisasi mencapai Rp. 629.092.900,- atau 100%;

B.3.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Pada Tahun 2024 ini, kegiatan lingkup TSDP telah didukung dengan anggaran operasionalisasi pengawasan pelayanan untuk 15 lokasi/wilayah kerja. Tentunya ke depan besar harapannya untuk terus kami tingkatkan pelayanannya dengan dukungan anggaran yang bukan hanya operasional pengawasannya namun juga pembangunan Pelabuhan penyeberangannya.

Dari hasil capaian kinerja Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP Tahun 2024 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang cukup memuaskan ini, BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan operasionalisasi Pelabuhan SDP secara optimal. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan baik melalui revitalisasi/rehabilitasi maupun peningkatan sarana prasarana pendukung layanan Pelabuhan SDP.

BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan operasional Pelabuhan SDP melalui beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan penyelenggaraan operasional Pelabuhan SDP baik berupa dukungan sarana dan prasarananya maupun peningkatan kualitas pelayanannya;
2. Melaksanakan perbaikan sistem informasi Pelabuhan SDP baik berupa ticketing online, maupun informasi keberangkatan dan kedatangan;
3. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait keselamatan pelayaran Pelabuhan penyeberangan.

BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A melalui Pembiayaan Operasional Terminal Tipe-A yang dikelola, Pelayanan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A berdampak pada terlaksananya pelayanan transportasi darat yang memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Barat dengan upaya peningkatan pelayanan berupa modernisasi sistem pelayanan transportasi darat (pengembangan sistem informasi berbasis internet dan penerapan pelayanan berbasis teknologi) di tahun-tahun yang akan datang.

C. SK4 MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu :

1. IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal;
2. IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat;
3. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan;

C.1 IKK.3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap

Kondisi Ideal

C.1.1 Definisi Indikator Kinerja

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi :

1. Marka Jalan;
2. Rambu Lalu Lintas;
3. Patok Lalu Lintas;
4. Paku Jalan;
5. Pagar Pengaman Jalan;
6. Alat Penerangan Jalan;
7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan;

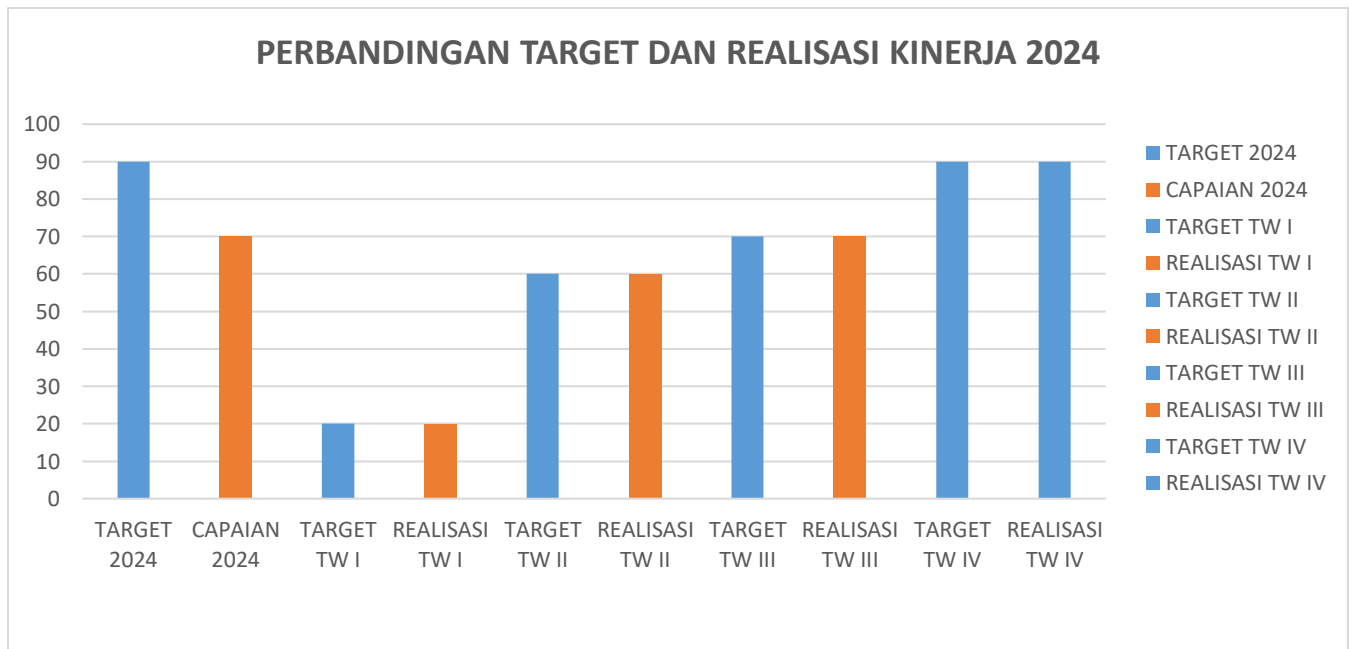
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
9. Cermin Tikungan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal dengan satuan ukur persentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Persentase Perlengkapan Jalan yang terpasang pada Tahun 2024}}{\text{Persentase Perlengkapan Jalan sesuai kondisi ideal pada Tahun 2024}} \times 100\%$$

C.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2024 sebesar 90% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 90%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.10. Grafik Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
90	70	20	20	60	60	70	70	90	90

C.1.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada Tahun 2024 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{70\%}{90\%} \times 100\%$$

Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebanyak Rp. 40.559.817.068, dari total pagu sebesar Rp. 40.564.014.000 atau sebesar 99,99 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Bantuan teknis perlengkapan jalan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 10.500.000.000,- dan realisasi s/d Tahun 2024 mencapai Rp. 10.499.990.000,- atau 100%;
2. Perlengkapan Jalan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 26.424.371.000,- dan realisasi s/d Tahun 2024 mencapai Rp. 26.420.702.068,- atau 99,99%.

Realisasi anggaran masih menunjukan 99,99% namun capaian presentase perlengkapan menunjukan 90% ini menandakan bahwa presentase perlengkapan jalan yang terpasang sudah menunjukan angka yang cukup, sehingga ketika kegiatan bantuan teknis maupun pemasangan perlengkapan jalan dilaksanakan 2024 diharapkan dapat semakin meningkatkan presentase perlengkapan jalan menuju kondisi ideal.

C.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Sesuai amanat Undang-undang No 22 Tahun 2009 pasal 25 disebutkan bahwa “Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan”. Perlengkapan jalan untuk :

- a. Jalan Nasional merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat;
- b. Jalan Provinsi merupakan tanggung jawan Pemerintah Provinsi;
- c. Jalan Kabupaten/ kota dan jalan desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- d. Jalan Tol menjadi tanggungjawab badan usaha jalan tol.

Dari hasil capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2024 yang menunjukan realisasi capaian kinerja yang baik meskipun

belum didukung dengan realisasi anggaran yang masih terkendala adanya perubahan juklak/juknis pengadaan perlengkapan jalan.

BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang menuju kondisi ideal melalui upaya :

1. Melaksanakan percepatan pengadaan bantuan teknis perlengkapan jalan di sejumlah ruas jalan di Jawa Barat yang berdampak pada terwujudnya optimalisasi penerapan skema manajemen keselamatan LLAJ berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan di sejumlah ruas jalan wilayah Provinsi Jawa Barat, dan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di sejumlah ruas jalan wilayah Jawa Barat berdampak pada terwujudnya optimalisasi penerapan skema manajemen keselamatan LLAJ di tahun-tahun yang akan datang;
2. Mendukung upaya perbaikan kualitas pengadaan perlengkapan jalan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Mendorong perbaikan sistem informasi pemasangan perlengkapan jalan guna menunjang pemetaan pemasangan di titik-titik yang merupakan prioritas jalan nasional.

C.2 IKK.3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

C.2.1 Definisi Indikator Kinerja

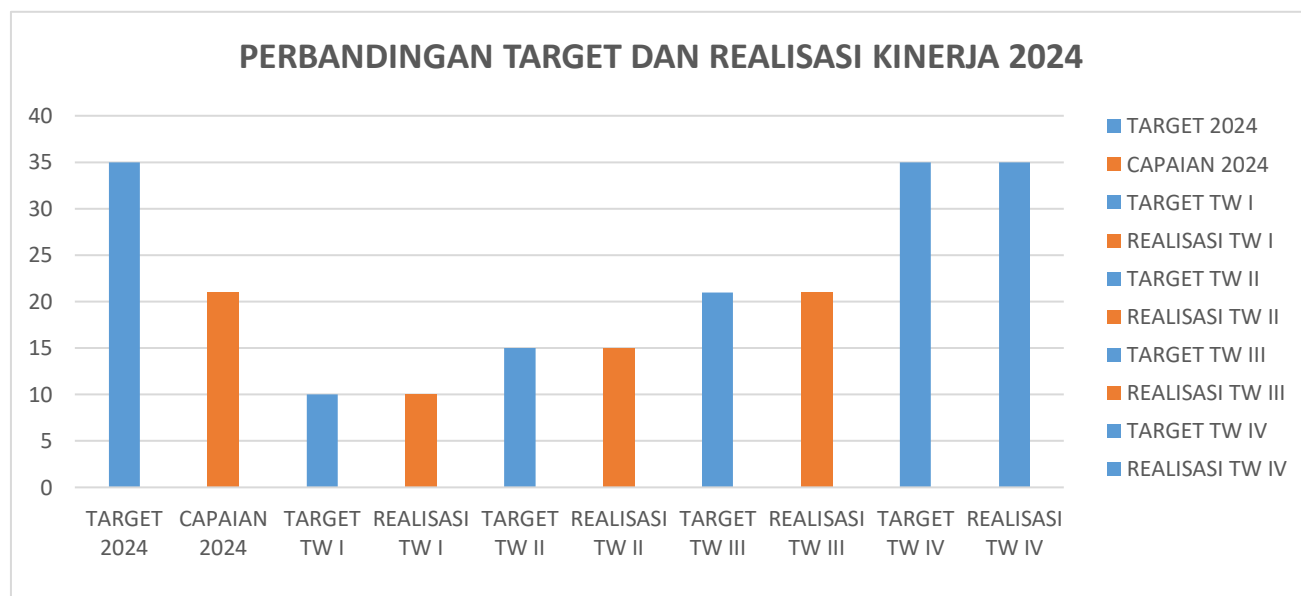
Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat dengan satuan ukur persentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Pelanggaran pada UPPKB di BPTD Kelas II Jawa Barat Tahun 2024}}{\text{Jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk pada UPPKB di BPTD Kelas II Jawa Barat Tahun 2024}} \times 100\%$$

C.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 sebesar 35% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 35%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.11. Grafik Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
35	21	10	10	15	15	21	21	35	35

C.2.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sesuai PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan yang diperkuat dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan bahwa UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 memiliki persentase capaian sebesar 35% yang menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran kendaraan yang memasuki area UPPKB masih relatif tinggi.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{(35\% - (21\% - 35\%))}{35\%} \times 100\%$$

Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2024, per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebanyak Rp. 10.842.348.790,- dari total pagu sebesar Rp. 10.844.049.000,- atau sebesar 99,98 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Operasional UPPKB Balonggandu dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.294.061.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.293.561.637,- atau 99,98%;
2. Operasional UPPKB Losarang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.253.751.000,- dan realisasi mencapai Rp. 2.253.480.094,- atau 99,99%;
3. Operasional UPPKB Gentong dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.657.040.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.656.898.737,- atau 99,99%;
4. Operasional UPPKB Tomo dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.679.726.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.679.562.866,- atau 99,99%;
5. Operasional UPPKB Cibaragalan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.567.710.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.567.435.648,- atau 99,98%;
6. Operasional UPPKB Kemang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.343.093.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.342.832.542,- atau 99,98%;
7. Operasional UPPKB Bojong dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 48.668.000,- dan realisasi mencapai Rp. 48.577.166,- atau 99,81%.

C.2.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja yang kurang memuaskan ini, BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja untuk senantiasa bisa menurunkan angka persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat melalui upaya :

1. Melaksanakan sosialisasi/memberikan edukasi peraturan terkait kepada para pengusaha jasa angkutan barang, dll untuk menekan jumlah pelanggaran;
2. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan patroli/piket serta kegiatan penegakan hukum lainnya untuk mendorong efektifitas kegiatan gakum serta memberikan efek jera kepada kendaraan yang masih melakukan pelanggaran;
3. Mendorong perbaikan sistem informasi yang menunjang kegiatan penindakan pelanggaran pada UPPKB di lingkungan BPTD Kelas II Jawa Barat.

C.3 IKK.3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

C.3.1 Definisi Indikator Kinerja

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).

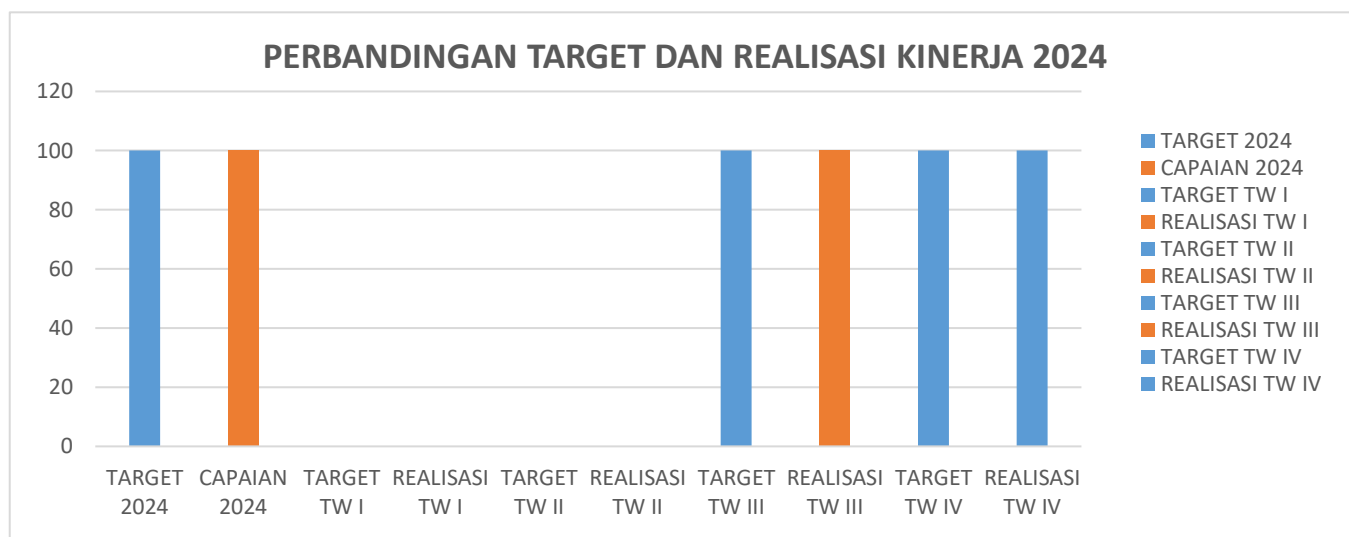
Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan dengan satuan ukur jumlah digunakan rumus sebagai berikut:

= Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ

C.3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan pada Tahun 2024 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% dikarenakan sedang menunggu proses revisi sumber dana kegiatan. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.14. Grafik Capaian IKK jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan.



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
100	100	0	0	0	0	100	100	100	100

C.3.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Indikator Kinerja Kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan pada Tahun 2024 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% di akhir tahun **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Jalan Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebanyak Rp. 350.000.000 dari total pagu sebesar Rp. 350.000.000,- atau sebesar 100%.

C.3.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

kami akan segera melaksanakan kegiatan tersebut untuk pencapaian kinerja yang lebih baik. Adapun beberapa upaya yang akan kami laksanakan adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan sosialisasi/memberikan edukasi kepada para stakeholders terkait mengenai pentingnya keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
- Melaksanakan evaluasi efektifitas penyelenggaraan pekan nasional keselamatan angkutan jalan;
- Mendorong perbaikan sistem informasi yang menunjang kegiatan.

D. SK5 MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS TRANSPORTASI DARAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. IKK 5.1.Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

D.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

D.1.1 Definisi Indikator Kinerja

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a) Aspek Perencanaan;
- b) Aspek Kepegawaian (SDM);
- c) Aspek Keuangan;
- d) Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum).

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi *e-performance*.

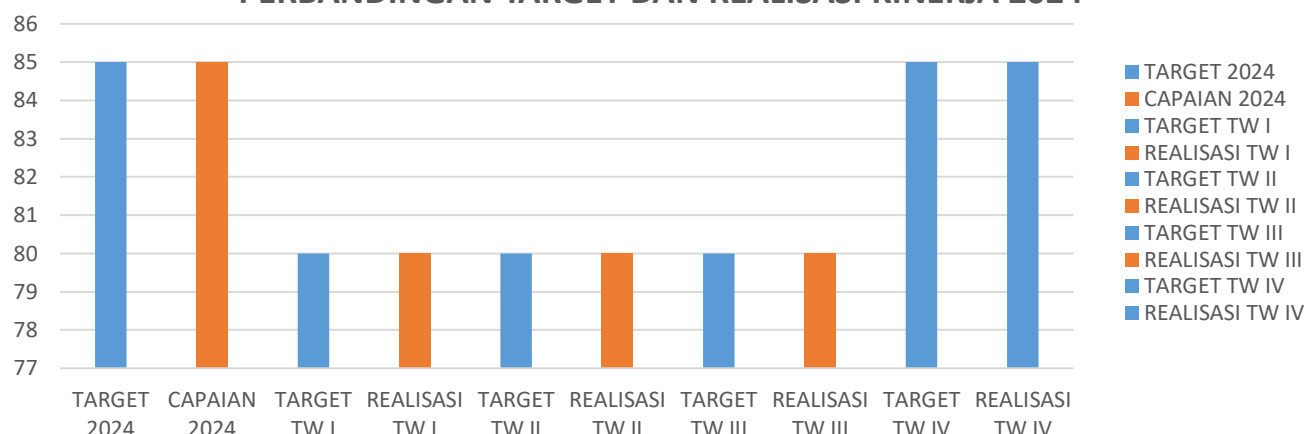
Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran

D.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2024 mempunyai nilai 85 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan nilai 85, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.18. Grafik Capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA 2024



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	REALISASI TW III	TARGET TW III	REALISASI TW IV	TARGET TW IV
85	85	80	80	80	80	80	80	85	85

D.1.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Adapun pelaksanaan tupoksi ini meliputi beberapa aspek penunjang penyelenggaraan dukungan teknis.

Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan IV Tahun 2024 mempunyai nilai 85. Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat telah memenuhi target yang ditetapkan

Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap kegiatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebanyak Rp. 10.636.365.123,- dari total pagu sebesar Rp. 10.637.426.000,- atau sebesar 99,99% dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 10.637.426.000,- dan realisasi mencapai Rp. 10.636.365.123,- atau 99,99%;

D.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Pada Triwulan IV Tahun 2024 ini Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat telah memenuhi target yang ditetapkan, namun BPTD Kelas II Jawa Barat akan selalu terus berupaya meningkatkan aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat melalui :

1. Melaksanakan sosialisasi/memberikan edukasi kepada para pegawai tentang pentingnya menjaga kualitas penyelenggaraan dukungan teknis;
2. Melaksanakan evaluasi efektifitas penyelenggaraan dukungan teknis;
3. Mendorong perbaikan sistem informasi yang menunjang kegiatan.

E. SK6 MENINGKATNYA BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu :

1. IKK 6.1. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

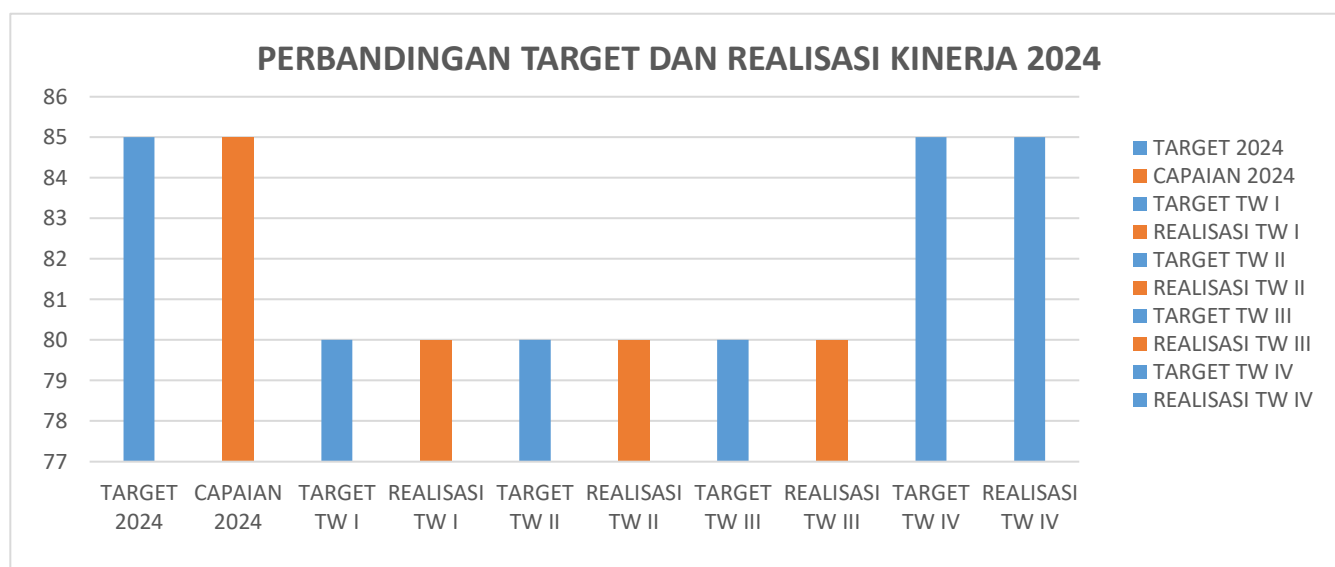
E.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

E.1.1 Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

E.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Triwulan IV Tahun 2024 mempunyai nilai 85 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan nilai 85, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.19. Grafik Capaian IKK Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
85	85	80	80	80	80	80	80	85	85

E.1.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Adapun pelaksanaan tupoksi ini meliputi beberapa aspek penunjang penyelenggaraan perkantoran.

Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Triwulan IV Tahun 2024 mempunyai nilai 85. Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memenuhi target yang ditetapkan.

Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap tingkat penyelenggaraan perkantoran Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebanyak Rp. 49.988.942.878,- dari total pagu sebesar Rp. 50.114.111.000,- atau sebesar 99,% dengan rincian sebagai berikut :

1. Layanan Perkantoran dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 6.987.638.000,- dan realisasi mencapai Rp. 6.987.117.979,- atau 99,99%;

2. Layanan Perkantoran / Gaji dukungan anggaran sebesar Rp. 43.126.473.000,- dan realisasi mencapai Rp. 43.001.824.899,- atau 99,71%

E.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Pada Tahun 2024 ini Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan perkantoran telah memenuhi target yang ditetapkan, namun BPTD Kelas II Jawa Barat akan selalu terus berupaya meningkatkan aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat melalui :

1. Melaksanakan sosialisasi / memberikan edukasi kepada para pegawai tentang pentingnya menjaga kualitas penyelenggaraan dukungan teknis;
2. Melaksanakan evaluasi efektifitas penyelenggaraan dukungan perkantoran;
3. Mendorong perbaikan sistem informasi yang menunjang kegiatan.

Pada Tahun 2024 ini Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memenuhi target yang ditetapkan, namun BPTD Kelas II Jawa Barat akan selalu terus berupaya meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

III.3 REALISASI ANGGARAN

III.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2024

Pagu Anggaran Awal Tahun 2024 Posisi 18 Januari 2024 sebesar Rp. 192.691.311.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Rincian Sumber Dana

RM	:	Rp.	171.650.311.000,-
PNBP	:	Rp.	21.041.000.000,-
SBSN PBS	:	Rp.	-
TOTAL	:	Rp.	192.691.311.000,-

- Rincian Jenis Belanja

Belanja Pegawai	:	Rp.	36.754.270.000,-
Belanja Barang	:	Rp.	111.685.239.000,-
Belanja Modal	:	Rp.	44.251.802.000,-
Total	:	Rp.	192.691.311.000,-

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA BPTD Kelas II Jawa Barat Triwulan IV TA. 2024 pada Revisi DIPA ke 13 tanggal 20 Desember 2024 sehingga total pagu per 31 Desember 2024 pada DIPA BPTD Kelas II Jawa Barat adalah sebesar **Rp. 229.163.753.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

- Rincian Sumber Dana

RM	:	Rp.	178.236.914.000,-
PNBP	:	Rp.	50.926.839.000,-
SBSN PBS	:	Rp.	
TOTAL	:	Rp.	229.163.753.000,-

- Rincian Jenis Belanja

Belanja Pegawai	:	Rp.	43.126.473.000,-
Belanja Barang	:	Rp.	113.631.389.000,-
Belanja Modal	:	Rp.	72.405.891.000,-
Total	:	Rp.	229.163.753.000,-

- Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan DIPA Revisi ke-1 yang diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2024, perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada BPTD Kelas II Jawa Barat sebesar Rp. 192.691.311.000,- Dari pagu Revisi ke-1 sebesar Rp. 192.691.311.000,- menjadi sebesar Rp. 299.163.753.000,-

- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2024

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut :

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 2608 4139 0973 1684 pada tanggal 18 Januari 2024 (Revisi ke-1);
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 3022 2450 9672 4524 pada tanggal 31 Januari 2024 (Revisi ke-2).
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 3022 2450 9672 4524 pada tanggal 1 Februari 2024 (Revisi ke-3).
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 3022 2450 9672 4524 pada tanggal 23 April 2024 (Revisi ke-4).
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 9203 4779 3057 0102 pada tanggal 21 Juni 2024 (Revisi ke-5).

- f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 4729 2095 1697 5561 pada tanggal 21 Agustus 2024 (Revisi ke-6).
- g. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 8672 7304 9377 0455 pada tanggal 30 Agustus 2024 (Revisi ke-7).
- h. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 6213 0382 4974 1910 pada tanggal 08 Oktober 2024 (Revisi ke-8).
- i. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 8047 6892 7042 6832 pada tanggal 13 November 2024 (Revisi ke-9).
- j. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 5900 9391 1050 8624 pada tanggal 16 November 2024 (Revisi ke-10).
- k. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 4154 4091 9936 9402 pada tanggal 27 November 2024 (Revisi ke-11).
- l. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 0062 7832 2001 3883 pada tanggal 18 November 2024 (Revisi ke-12).
- m. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 0062 7832 2001 3883 pada tanggal 20 Desember 2024 (Revisi ke-13).

• Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024

NO	KETERANGAN	RM	PNBP	SBSN	TOTAL ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pagu Awal	171.650.311.000	21.041.000.000	-	192.691.311.000
2.	Revisi ke-01	171.650.311.000	21.041.000.000	-	192.691.311.000
3.	Revisi ke-02	171.650.311.000	21.041.000.000	-	192.691.311.000
4.	Revisi ke-03	171.650.311.000	21.041.000.000	-	192.691.311.000
5.	Revisi ke-04	171.650.311.000	21.041.000.000	-	192.691.311.000
6.	Revisi ke-05	174.032.133.000	21.041.000.000	-	195.073.133.000
7.	Revisi ke-06	174.696.533.000	29.365.089.000	-	204.061.622.000
8.	Revisi ke-07	179.386.914.000	29.365.089.000	-	208.752.003.000
9.	Revisi ke-08	179.386.914.000	51.096.839.000	-	230.483.753.000
10.	Revisi ke-09	178.936.839.000	50.926.839.000	-	229.863.753.000
11.	Revisi ke-10	178.936.914.000	50.926.839.000	-	229.863.753.000
12.	Revisi ke-11	178.236.914.000	50.926.839.000	-	229.163.753.000
13.	Revisi ke-12	178.236.914.000	50.926.839.000	-	229.163.753.000
14.	Revisi ke-13	178.236.914.000	50.926.839.000	-	229.163.753.000

Sumber : Layanan SatuDJA

- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN I TA. 2024
Belanja Pegawai	Rp. 36.754.270.000,-	-	Rp. 36.754.270.000,-
Belanja Barang	Rp. 66.637.471.000,-	-	Rp. 66.637.471.000,-
· RM	Rp. 66.637.471.000,-		Rp. 66.881.292.000,-
· PNBPNBP		-	
Belanja Modal	Rp. 67.494.472.000,-	-	Rp. 67.494.472.000,-
· RM	Rp. 46.244.472.000,-	-	Rp. 46.244.472.000,-
· PNBPNBP	21.250.000.000	-	21.250.000.000
· SBSN	-	-	-
TOTAL	Rp. 171.605.311.000,-		Rp. 171.605.311.000,-

Sumber : Layanan SatuDJA dan OM SPAN

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN II TA. 2024
Belanja Pegawai	Rp. 36.421.116.000,-	Rp.39.139.029.000	Rp. 39.139.029.000,-
Belanja Barang	Rp. 111.685.239.000,-	Rp. 111.685.239.000,-	Rp. 111.685.239.000,-
· RM	Rp. 171.650.311.000,-	Rp. 174.032.133.000,-	Rp. 174.032.133.000,-
· PNBPNBP	Rp. 21.041.000.000,-	Rp. 21.041.000.000,-	Rp. 21.041.000.000,-
Belanja Modal	Rp. 44.251.802.000,-	Rp. 44.251.802.000,-	Rp. 44.251.802.000,-

· RM	Rp. 174.032.133.000,-	Rp. 174.032.133.000,-	Rp. 174.032.133.000,-
· PNBP	Rp. 21.041.000.000,-	Rp. 21.041.000.000,-	Rp. 21.041.000.000,-
· SBSN	-	-	-
TOTAL	Rp. 192.691.311.000,-	(Rp.159.653.000,-)	Rp. 159.833.982.000,-

Sumber : Layanan SatuDJA dan OM SPAN

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN III TA. 2024
Belanja Pegawai	Rp. 36.754.270.000,-	7.072.203.000	Rp. 43.826.473.000,-
Belanja Barang	Rp. 66.637.471.000,-	45.712.168.000	Rp. 112.349.639.000,-
· RM	Rp. 66.637.471.000,-		Rp. 66.637.471.000,-
· PNBP	-	-	-
Belanja Modal	Rp. 67.494.472.000,-	-14.918.581.000	Rp. 52.575.891.000,-
· RM	Rp. 46.244.472.000,-	-	Rp. 46.244.472.000,-
· PNBP	RP. 21.250.000.000	8.115.089.000	Rp. 29.365.089.000
· SBSN		-	
TOTAL	Rp. 170.886.213.000,-	37.865.790.000	Rp. 208.752.003.000,-

Sumber : Layanan SatuDJA dan OM SPAN

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN IV TA. 2024
Belanja Pegawai	Rp. 36.754.270.000,-	Rp. 6.372.203.000	Rp. 43.126.473.000,-
Belanja Barang	Rp. 66.637.471.000,-	Rp. 946.993.918.000	Rp. 113.631.389.000,-
· RM	Rp. 66.637.471.000,-	-	Rp. 66.637.471.000,-
· PNPB	-	-	-
Belanja Modal	Rp. 67.494.472.000,-	Rp. 4.911.419.000	Rp. 72.405.891.000,-
· RM	Rp. 46.244.472.000,-	-	Rp. 178.236.914.000,-
· PNPB	RP. 21.250.000.000	Rp.29.676.839.000	Rp. 50.926.839.000,-
· SBSN	-	-	-
TOTAL	Rp. 170.886.213.000,-	Rp.58.277.540.000	Rp. 229.163.753.000,-

Sumber : Layanan SatuDJA dan OM SPAN

- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

Kode Nama Kegiatan	Pagu Awal	Pagu TW I
4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	7.038.965.000	34.700.076.000
4638 Pelayanan Transportasi Darat	56.511.986.000	45.550.169.000
4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	57.999.561.000	60.518.158.000
4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.937.500.000	8.181.000.000
4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.418.931.000	6.987.638.000
4671 Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	36.754.270.000	43.741.908.000
Jumlah	170.886.213.000	192.605.311.000

Kode Nama Kegiatan	Pagu Awal	Pagu TW II
4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	7.038.965.000	34.700.076.000
4638 Pelayanan Transportasi Darat	56.511.986.000	45.550.169.000
4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	57.999.561.000	60.518.158.000
4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.937.500.000	8.181.000.000
4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.418.931.000	6.987.638.000
4671 Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	36.754.270.000	46.123.730.000
Jumlah	170.886.213.000	195.073.133.000

Kode Nama Kegiatan	Pagu Awal	Pagu TW III
4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	7.038.965.000	34.700.076.000
4638 Pelayanan Transportasi Darat	56.511.986.000	56.874.258.000
4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	57.999.561.000	60.518.158.000
4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.937.500.000	8.845.400.000
4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.418.931.000	6.987.638.000
4671 Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	36.754.270.000	43.826.473.000
Jumlah	170.886.213.000	208.752.003.000

Kode Nama Kegiatan	Pagu Awal	Pagu TW IV
4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	7.038.965.000	28.703.927.000
4638 Pelayanan Transportasi Darat	56.511.986.000	76.117.906.000
4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	57.999.561.000	63.198.191.000
4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.937.500.000	11.029.618.000
4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.418.931.000	6.987.638.000
4671 Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	36.754.270.000	43.126.473.000
Jumlah	170.886.213.000	229.163.753.000

III.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2024.
Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp.220.193.027.959,-** atau mencapai **96,09%** dari total pagu sebesar **Rp.229.163.753.000,-**
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024
Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan rupiah)

NO	Jenis Belanja	Pagu TW I (Rp.)	Realisasi TW I		Pagu Tw II (Rp.)	Realisasi TW II		Pagu Tw III (Rp.)	Realisasi TW III		Pagu Tw IV (Rp.)	Realisasi TW IV	
			RP.	%		RP.	%		RP.	%		RP.	%
1	Belanja Pegawai	36.754.270.000	7.886.171.000	21,46%	39.139.092.000	27.085.160.572	69,21%	43.826.473.000	35.891.721.703	81,90%	43.126.473.473	42.980.419.833	99,66%
2	Belanja Barang	66.637.471.000	11.605.970.000	17,42%	111.685.239.000	36.890.431.676	33,03%	112.349.639.000	63.954.122.752	56,92%	113.631.389.000	110.388.192.024	97,15%
3	Belanja Modal	67.494.472.000	4.574.010.000	6,78	44.251.802.000	7.949.439.634	17,96%	52.575.891.000	23.295.193.054	44,31%	72.405.891.000	66.824.416.102	92,29%
TOTAL		171.605.311.000	24.066.151.000	14,08%	195.075.133.000	24.066.151	36,87%	208.752.003.000	123.610.956.491	58,99%	229.163.753.000	220.193.027.959	96,09%

- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

NO	Jenis Belanja	Pagu TW I (Rp.)	Realisasi TW I		Pagu Tw II (Rp.)	Realisasi TW II		Pagu Tw III (Rp.)	Realisasi TW III		Pagu Tw IV (Rp.)	Realisasi TW IV	
			RP.	%		RP.	%		RP.	%		RP.	%
1	Rupiah Murni	149.636.213.000	24.066.152.000	16,08%	174.032.133.000	174.032.133.000	39,52%	179.386.914.000	179.386.914.000	44,31%	178.236.914.000	178.236.914.000	99,99%
2	PNBP	21.250.000.000	-	-	21.041.000.000	21.041.000.000	14,95%	29.365.089.000	29.365.089.000	16,08%	50.926.839.000	50.926.839.000	99,78%
3	SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		171.605.311.000	24.066.152.000	14,08%	195.073.133.000	195.073.133.000	36,87%	208.752.003.000	208.752.003.000	58,99%	229.163.753.000	217.799.400.387	98,76%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana pada Triwulan IV Tahun 2024 menunjukkan tren yang positif walaupun belum maksimal, anggaran yang bersumber dana PNPB sudah tersedia.

- Analisis Dana yang Tidak Terserap

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh BPTD Kelas II Jawa Barat berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

- Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU TW I	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	36.754.270.000	19.934.366.213	16.819.903.787
2	Belanja Barang	66.637.471.000	28.514.644.779	38.122.826.221
3	Belanja Modal	67.494.472.000	13.135.136.370	54.359.335.630
TOTAL		171.605.311.000	61.584.147.362	109.302.065.638

- Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU TW II	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	39.139.092.000	27.085.160.572	12.053.931.428
2	Belanja Barang	111.685.239.000	36.890.431.676	74.794.807.324
3	Belanja Modal	44.251.802.000	7.949.439.634	36.302.362.366
TOTAL		195.754.133.000	24.066.151.000	171.687.982.000

- Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU TW III	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	43.826.473.000	35.891.721.703	7.934.751.297
2	Belanja Barang	112.349.639.000	63.954.122.752	48.395.516.248
3	Belanja Modal	52.575.891.000	23.295.193.054	29.280.697.946
TOTAL		208.752.003.000	123.610.965.491	85.141.037.509

- Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan IV Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU TW IV	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	43.126.473.000	42.980.419.833	146.053.167
2	Belanja Barang	113.631.389.000	110.388.192.024	3.243.196.024
3	Belanja Modal	72.405.891.000	66.824.416.102	5.581.474.898
TOTAL		229.163.753.000	220.193.027.959	8.970.725.041

- Sisa Anggaran Per Sumber Dana Triwulan I Tahun 2024

NO	SUMBER DANA	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	171.650.311.000	68.584.147.362	88.052.065.638
2	PNBP	21.250.000.000	-	21.250.000.000
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		171.605.311.000	68.584.147.362	109.302.065.638

- Sisa Anggaran Per Sumber Dana Triwulan II Tahun 2024

NO	SUMBER DANA	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	174.032.133.000	68.779.357.248	105.252.775.752
2	PNBP	21.041.000.000	3.145.674.634	17.895.325.366
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		195.073.133.000	71.925.031.882	123.148.101.118

- Sisa Anggaran Per Sumber Dana Triwulan III Tahun 2024

NO	SUMBER DANA	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	179.386.914.000	24.066.152.000	155.320.762.000
2	PNBP	29.365.089.000	-	29.365.089.000
3	SBSN			
TOTAL		208.752.003.000	24.066.152.000	184.685.851.000

- Sisa Anggaran Per Sumber Dana Triwulan IV Tahun 2024

NO	SUMBER DANA	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	178.236.914.000	178.236.914.000	92.398.267
2	PNBP	50.926.839.000	50.926.839.000	4.014.548
3	SBSN			
TOTAL		229.163.753.000	220.193.027.959	8.970.725.041

Dari total pagu anggaran BPTD Kelas II Jawa Barat sebesar Rp 229.163.753.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang dapat terealisasi sebesar Rp 220.193.027.959,- (Dua Ratus Dua Puluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 98,76% sehingga total dana yang belum terserap di lingkungan BPTD Kelas II Jawa Barat adalah sebesar Rp 8.970.725.041,- (Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Puluh satu Rupiah) atau sebesar 1,24%.

III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan sumber daya berdasarkan program per Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TRIWULAN I			EFESIENSI I POSISI TW II	EFESIENSI I POSISI TW III	EFESIENSI I POSISI TW IV
		% CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KEGIATAN	% CAPAIAN KEUANGAN	EFESIENSI POSISI TW I			
SK 1	Meningkatnya Konektifitas Transportasi Darat dan Ketepaduan antar Moda Transportasi	88,00%	12,94%	75,06%	75,06%	75,06%	100,00%
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	25,00%	1,68%	23,32%	23,32%	44,32%	100,00%
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	72,40%	10,99%	61,41%	61,41%	61,41%	100,00%
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	100%	8,78%	91,22%	91,22%	91,22%	100,00%
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	100%	21,49%	78,51%	78,51%	78,51%	100,00%
TOTAL		77,08%	8,60%	65,00%	65,00%	78,54%	100,00%

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 98,76 % menunjukkan bahwa adanya efisiensi anggaran sebesar 1,24%.

II.3.4 Hambatan dan Kendala

Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami hambatan kendala yang terlalu signifikan, berbeda dengan Tahun 2020 dimana pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan seperti banyak pekerjaan yang mengalami kemunduran jadwal pelaksanaan karena pembatasan aktivitas, dll. Pada Tahun 2024 ini memang kita masih dihadapkan dengan kondisi pandemi namun berkaca pada pengalaman pada tahun sebelumnya kita relatif masih bisa mengantisipasi kondisi serta kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi. Namun pada akhirnya, kami BPTD Kelas II Jawa Barat dapat menuntaskan kegiatan-kegiatan yang menjadi target kinerja pada Triwulan IV ini maupun pencapaian realisasi anggaran yang cukup memuaskan.

BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup

IV.1.1 Ringkasan Capaian

Wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya organisasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Renstra Tahun 2020-2024, yakni merupakan pelaksanaan tahun ketiga, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2024 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan hasil 12 (dua belas) indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$) dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada LKIP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
 - a. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan terealisasi sebesar 90% dari target Tahun 2024 90%;
 - b. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi terealisasi sebanyak 10 dari target 10 Lokasi;
 - c. Persentase Pelaksanaan Keperintisan SDP terealisasi sebesar 90% dari target Tahun 2024 90%;
 - d. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebanyak 15 dari target 15 Lokasi;
 - e. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A sebesar 100% dari target 100%;
 - f. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A sebesar 100% dari target 100%;
 - g. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP sebesar 100% dari target 100%;
 - h. Persentase Perlangkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal sebesar 90% dari target 90%;

- i. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 35% dari target 35%;
 - j. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebanyak 100 dari target 100 Orang;
 - k. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dengan realisasi nilai 85 dari target nilai 85;
 - l. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan realisasi nilai 85 dari target nilai 85.
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju pemerintahan yang professional, akuntabel, transparan, serta efektif dan efisien dengan pelayanan yang prima;
 3. Realisasi pencapaian kinerja BPTD Kelas II Jawa Barat sangat baik, dengan rata-rata capaian dari seluruh sasaran kegiatan ini sebesar 95% dari target keseluruhan sasaran kegiatan Tahun 2024.

IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	LAPTAH TAHUN 2024			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Trasnportasi Darat dan Keterpaduan Antar Moda Transportasi	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	90	80	80	90%	TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	Kepala Seksi Sarana SDP
			IKK 1.3	Jumlah terminal Tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	10	10	100%	TERCAPAI	Memastikan Terminal Tipe-A yang telah beroperasi mendapatkan dukungan operasional SDM dan anggaran yang memadai.	Kepala Seksi Prasarana SDP
			IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	90	90	90%	TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan penyebrangan bagi masyarakat di daerah-daerah untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	Kepala Seksi Sarana SDP
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	15	15	100%	TERCAPAI	Memastikan Pelabuhan SDP yang telah beroperasi mendapatkan dukungan operasional SDM dan anggaran yang memadai.-	Kepala Seksi Prasarana SDP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	LAPTAH TAHUN 2024			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Trasnportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Memastikan Prasarana pendukung pelaksanaan Standar pelayanan minimum Terminal Tipe-A dapat tersedia dengan baik.	Kepala Seksi Prasarana SDP
			IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe A	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Memastikan Sarana dan Prasarana pendukung penerapan SMART Terminal Tipe-A dapat tersedia dengan baik.	Kepala Seksi Prasarana SDP
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Memastikan Prasarana pendukung pelaksanaan Standar pelayanan minimum di Pelabuhan SDP dapat tersedia dengan baik.	Kepala Seksi Prasarana SDP
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Trasnportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Perlangkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90	90	90	100%	TERCAPAI	Memastikan Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terus dilakukan peningkatan guna menuju kondisi ideal yang diharapkan	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan SDP
			IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35	35	35	35%	TERCAPAI	Mendorong upaya kesadaran para pengusaha Angkutan Barang untuk secara aktif mendukung terwujudnya penurunan jumlah angka pelanggaran pada UPPKB.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan SDP
			IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Lokasi	100	100	100	100%	TERCAPAI	Memastikan Masyarakat tersosialisasi tentang keselamatan tentang keselamatan transportasi jalan yang diharapkan	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan SDP
4	SK5	Meningkatnya Pelayanan Trasnportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	85	85	85	100%	TERCAPAI	Memastikan Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan menuju kondisi ideal yang diharapkan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	IKK 6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	85	85	85	100%	TERCAPAI	Memastikan Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, BMN menuju kondisi ideal yang diharapkan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

REVISI II RENCANA KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1.	SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90%
			IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
			IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyebrangan	%	90%
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
2.	SK 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100%
			IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
3.	SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
			IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
			IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
4.	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
5.	SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Bandung, 28 Oktober 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat



HANURA KELANA I, A.Md.LLAJ., S.Sos., S.H., M.M
NIP. 19670516 198903 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fahmi, S.T., M.M.Tr

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 4 Januari 2024

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat



MUHAMMAD FAHMI, S.T., M.M.Tr
NIP. 19800724 200604 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyebrangan	%	100%
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
2.	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100%
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Kegiatan			Anggaran
1.	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp.	148.949.403.000
2.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat		34.700.076.000
3.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	45.550.169.000
4.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	60.518.158.000
5.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	8.181.000.000
6.	Pogram Dukungan Manajemen		43.741.908.000
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	6.987.638.000
8.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	36.754.270.000

Disetujui,
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Bandung, 4 Januari 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat



MUHAMMAD FAHMI, S.T., M.M.Tr
NIP. 19800724 200604 1 001



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
								Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan	%	100	051. Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	10%	15%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Rp	16.700.076.000	Seksi Sarana
			IKK1.2	Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan SDP	%	100	051. Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	10%	15%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Rp	18.000.000.000	Seksi Sarana
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	002. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Operasional Terminal)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Rp	28.313.553.000	Seksi Prasarana
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	051. Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Rp	2.236.616.000	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	051. Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A 052. Excellent Service Terminal Penumpang Tipe A	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp	45.550.169.000	Seksi Prasarana
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	002. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Operasional Terminal)	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp	28.313.553.000	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	051. Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp	2.236.616.000	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	051. Pengadaan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional 052. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan 053. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) 051. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	10%	15%	20%	20%	20%	60%	60%	65%	70%	70%	75%	90%	Rp	43.328.142.000	Seksi LLJSDP
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	052. Operasional UPPKB	0%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	20%	21%	21%	26%	35%	Rp	10.799.016.000	Seksi LLJSDP
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	051. Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	Rp	350.000.000	Seksi LLJSDP
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	023. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	70	75	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	Rp	8.181.000.000	TU,Seksi Sarana, Seksi Prasarana, Seksi LLJSDP
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	85	002.K. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 001. Gaji dan Tunjangan	70	75	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	Rp	43.741.908.000	Sub Bagian TU

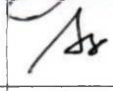
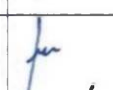




REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat
Tahun 2024

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Dani Muhamad Yanuar	Penyusun Rencana dan Pelaporan	25/06/2024	
2	Dikonsep	Gilang Adi Subagja, S.A.P	Penyusun Rencana dan Pelaporan	25/06/2024	
3	Diperiksa	Danny Irawan, S.SiT	Kepala Subbagian Tata Usaha	26/06/2024	
4	Disetujui	Danny Irawan, S.SiT	Kepala Subbagian Tata Usaha	26/06/2024	
5	Disetujui	Agus Gunadi.Kom., M.Hum	Kepala Seksi Lalu lintas Jalan,Sungai,Danau Penyeberangan dan Pengawasan	26/06/2024	
6	Disetujui	Didik Tri Margono, S.E., M.M.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan,Sungai, Danau dan Penyeberangan	26/06/2024	
7	Disetujui	Ade Supriadi,S.E., M.M.	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	26/06/2024	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fahmi, S.T., M.M.Tr

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 1 Juli 2024

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

IRJEN POL. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K
NRP.66110433

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat



MUHAMMAD FAHMI, S.T., M.M.Tr
NIP. 19800724 200604 1 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyebrangan	%	100%
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
2.	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100%
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
5.	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Kegiatan

Anggaran

1.	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp.	148.949.403.000
2.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat		34.700.076.000
3.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	45.550.169.000
4.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	60.518.158.000
5.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	8.181.000.000
6.	Pogram Dukungan Manajemen		43.741.908.000
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	6.987.638.000
8.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	39.136.092.000

Disetujui,
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

IRJEN POL. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K
NRP.66110433

Bandung, 1 Juli 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat



MUHAMMAD FAHMI, S.T., M.M.Tr
NIP. 19800724 200604 1 001

REVISI 1 RENCANA AKSI ATAS PENJAJERIAN KONTRAK TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	KASABAHAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PEMANGGUNG JAWAB	
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12			
1	REK1	Meningkatnya kinerja/witas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi																		
		IKK1.1	Persentase pelaksanaan kepatutan angkutan jalan	%	100	061. Angkutan Jalan Perkotaan (Urban Transport)	10%	15%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Rp 16.700.076.000	Sekel Sarana	
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan kepatutan angkutan SDP	%	100	Angkutan SDP Prioritas (Prioritas Nasional)	10%	15%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Rp 18.000.000.000	Sekel Sarana	
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	002. Operasional dan Pemeliharaan Parkiran (Operasional Terminal)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Rp 22.698.109.000	Sekel Prasarana	
		IKK1.6	Jumlah perbaikan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	051. Operasional Pelebaran Bangkai, Damar dan Pengalangan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Rp 3.352.060.000	Sekel Prasarana	
2	REK3	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat																		
		IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe A	%	100	051. Perbaikan/Revitalisasi Terminal Pemanggang Tipe A 052. Eksekusi Service Terminal Pemanggang Tipe A	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp 22.698.109.000	Sekel Prasarana
		IKK2.4	Persentase penerapan SMART terminal Tipe A	%	100	002. Operasional dan Pemeliharaan Parkiran (Operasional Terminal)	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp 22.698.109.000	Sekel Prasarana
		IKK2.2	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di perbaikan SDP	%	100	051. Operasional Pelebaran Bangkai, Damar dan Pengalangan	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp 3.352.060.000	Sekel Prasarana
3	REK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat																		
		IKK3.1	Persentase pelanggaran jalan yang telah terpangang terhadap kondisi ideal	%	90%	051. Pengadaan Pemasangan Perlangkapan Jalan Nasional 052. Bantuan Teknis Perlangkapan Jalan 053. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)	10%	15%	20%	20%	20%	60%	60%	65%	70%	70%	75%	90%	Rp 43.328.142.000	Sekel LL-RDP
		IKK3.2	Persentase penumpang pada UPPKS Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	052. Operasional UPPKS	0%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	20%	21%	21%	26%	33%	Rp 10.799.016.000	Sekel LL-RDP
		IKK3.3	Jumlah masyarakat yang terancam keselamatan transportasi jalan	Orang	100	051. Penyelenggaraan Peken Keselamatan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	Rp 350.000.000	Sekel LL-RDP
4	REK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat																		
		IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	023. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	70	75	80	80	80	80	80	80	80	85	85	85	Rp 8.181.000.000	TU, Sekel Sarana, Sekel Prasarana, Sekel LL-RDP
5	REK1	Meningkatnya Kinerja Ditjen Perhubungan Darat Akutabel																		
		IKK1.1	Tingkat Penyelenggaraan Perawatan Ditjen Perhubungan darat	Nilai	85	002. Operasional dan Pemeliharaan Kendor 001. Gaji dan Tunjangan	70	75	80	80	80	80	80	80	80	85	85	85	Rp 46.123.730.000	Sekel Bagian TU

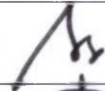
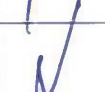




REVISI II PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi II Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat
Tahun 2024

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Gilang Adi Subagja, S.A.P	Penyusun Rencana dan Pelaporan	11 /10/2024	
2	Dikonsep	Dani Muhamad Yanuar	Penyusun Rencana dan Pelaporan	11 /10/2024	
3	Diperiksa	Danny Irawan, S.SiT	Kepala Subbagian Tata Usaha	18 /10/2024	
4	Disetujui	Danny Irawan, S.SiT	Kepala Subbagian Tata Usaha	18 /10/2024	
5	Disetujui	Agus Gunadi, S.Kom., M.Hum	Kepala Seksi Lalu lintas Jalan,Sungai,Danau Penyeberangan dan Pengawasan	21 /10/2024	
6	Disetujui	Didik Tri Margono, S.E., M.M.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan,Sungai, Danau dan Penyeberangan	21 /10/2024	
7	Disetujui	Ade Supriadi,S.E., M.M.	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	21 /10/2024	



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanura Kelana I, A.Md.LLAJ., S.Sos., S.H., M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani,A.T.D., M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 2 Desember 2024

Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Jawa Barat



HANURA KELANA I, A.Md.LLAJ., S.Sos., S.H., M.M.
NIP. 19670516 198903 1 012

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90%
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyebrangan	%	90%
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
2.	SK2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100%
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
4.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85

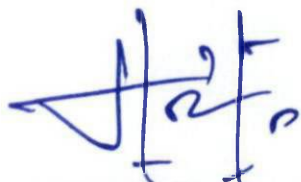
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Kegiatan

Anggaran

1.	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp.	179.049.642.000
2.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	28.703.927.000
3.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	76.117.906.000
4.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	63.198.191.000
5.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	11.029.618.000
6.	Pogram Dukungan Manajemen	Rp.	50.814.111.000
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	6.987.638.000
8.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	43.826.473.000

Disetujui,
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat



AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Bandung, 2 Desember 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat



HANURA KELANA I, A.Md.LLAJ., S.Sos., S.H., M.M
NIP. 19670516 198903 1 012



REVISI II RENCANA ANGGARAN PEKERJAAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB			
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90	051. Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	10%	15%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	75%	80%	85%	90%	Rp	13.862.145.000	Seksi Sarana
			IKK1.2	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan SDP	%	90	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	10%	15%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	75%	80%	85%	90%	Rp	18.000.000.000	Seksi Sarana
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	002. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Operasional Terminal)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Rp	27.198.109.000	Seksi Prasarana
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	051. Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Rp	3.352.060.000	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	051. Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A 052. Excellent Service Terminal Penumpang Tipe A	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp	31.698.109.000	Seksi Prasarana
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	002. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Operasional Terminal)	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp	27.198.109.000	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	051. Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp	3.352.060.000	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	051. Pengadaan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional 052. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan 053. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) 051. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	10%	15%	20%	20%	20%	60%	60%	65%	70%	70%	75%	90%	Rp	37.939.041.000	Seksi LLJSDP
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	052. Operasional UPPKB	0%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	20%	21%	21%	26%	35%	Rp	10.799.016.000	Seksi LLJSDP
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	051. Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	Rp	350.000.000	Seksi LLJSDP
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	023. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tugaski Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	70	75	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	Rp	8.845.400.000	Sub Bagian TI
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	85	002.K. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 001. Gaji dan Tunjangan	70	75	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	Rp	43.826.473.000	Sub Bagian TU

Bandung, 25 Oktober 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat





MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDUKTOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN JANUARI				REALISASI BULAN JANUARI		% CAPAIAN BULAN JANUARI		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
								VOLUME	%	VOLUME	%								VOLUME
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi																	
		IKK1.1	Perentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	10%	10%	13.862.145.000	0	10%	13.862.145.000	10%	0	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
		IKK1.2	Perentase pelaksanaan keperintisan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	100%	100%	100%	18.000.000.000	0%	15	18.000.000.000	15	0	-	-	Seksi LLJSDP
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIRAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	22.043.987.000	2,88%	10	22.043.986.012	10	2,88%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	3.069.100.000	8,44%	15	3.069.008.050	15	8,44%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat																	
		IKK2.1	Perentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	10%	10%	22.043.987.000	2,88%	10%	22.043.986.012	10%	2,88%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK2.2	Perentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	10	0	1%	22.043.987.000	2,88%	0	22.043.986.012	10	2,88%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK2.3	Perentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	3.069.100.000	8,44%	15	3.069.008.050	15	8,44%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat																	
		IKK3.1	Perentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	10%	11,11%	37.929.041.000	0	10%	37.929.041.000	0	0	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
		IKK3.3	Perentase pelanggaran pada UPPKB Dijen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	0%	0%	10.562.343.000	2.19 %	0	10.562.343.114	0	2.19 %	Operasional sudah berjalan namun persentase pelanggaran minim	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	0	0%	0	0	0%	0	300.000.000	0	100,00%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	Seksi LLJSDP
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat																	
		IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	70	82%	8.151.480.000	0,36 %	70	8.151.482.000	70	0,36 %	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Dijen Perhubungan Darat																	
		IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Personennan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	70	82%	39.388.141.000	90,05%	70	39.388.141.061	70	90,05%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJAKSIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDUKTOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN FEBRUARI				REALISASI BULAN FEBRUARI		% CAPAIAN BULAN FEBRUARI		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
								VOLUME	%	VOLUME	%								VOLUME
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	10%	10%	13.862.145.000	0	10%	13.862.145.000	10%	0	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
IKK1.2			Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	100%	100%	100%	18.000.000.000	0%	15	18.000.000.000	15	0	-	-	Seksi LLJSDP
IKK1.3			Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIRAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANGJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	2.880.527.000	12,69%	10	2.880.526.608	10	12,69%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
IKK1.6			Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	424.872.000	12,67%	15	424.871.950	15	12,67%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
2	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	10%	10%	2.880.527.000	12,69%	10%	2.880.526.608	10%	12,69%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
IKK2.2			Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	10	0	1%	2.880.527.000	12,69%	0	2.880.526.608	10	12,69%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
IKK2.3			Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	424.872.000	12,67%	15	424.871.950	15	12,67%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	0%	0,00%	37.929.041.000	0	0%	37.929.041.000	0	0	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
IKK3.2			Persentase pelanggaran pada UPPKB Dijen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	5%	14%	895.483.000	8,29%	5%	895.483.491	0	8,29%	Operasional sudah berjalan namun persentase pelanggaran minim	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
IKK3.3			Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	0	0%	0	300.000.000	0%	0	300.000.000	0	100,00%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	Seksi LLJSDP
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	75	88%	8.151.480.000	10,71%	75	876.575.038	75	10,71%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6 Meningkatnya Birokrasi Dijen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Personennan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	75	88%	8.404.433.000	19,21%	75	8.404.433.669	75	19,21%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN MARET				REALISASI BULAN MARET		% CAPAIAN BULAN MARET		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN					
								VOLUME	%	VOLUME	%								VOLUME	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	25%	25%	13.862.145.000	0	25%	13.862.145.000	25%	0	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
			IKK1.2	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	100%	100%	100%	18.000.000.000	0%	15	18.000.000.000	15	0	-	-	Seksi LLJSDP
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SURABANG 9.TTA.SUKARUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	6.925.751.000	30,51%	10	6.925.759.921	10	30,51%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	908.004.500	27,09%	15	908.004.503	15	27,09%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	10%	10%	6.925.751.000	30,51%	10%	6.925.759.921	10%	30,51%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	10	0	1,00%	6.925.751.000	30,51%	0	6.925.759.921	10	30,51%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	908.004.500	27,09%	15	908.004.503	15	27,09%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	15%	16,67%	37.929.041.000	100%	15%	37.929.041.000	90	100%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	10%	29%	2.708.455.762	25,08%	10%	2.708.455.762	35	25,08%	Operasional sudah berjalan namun presentase pelanggaran minim	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	0	0%	0	0	0%	0	300.000.000	0	100,00%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	Seksi LLJSDP
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	80	94%	2.650.722.400	32,40%	80	2.650.722.451	80	32,40%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	80	94%	19.624.933.900	44,87%	80	19.624.933.930	80	44,87%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN APRIL				REALISASI BULAN APRIL		% CAPAIAN BULAN APRIL		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN					
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	40%	40%	100%	13.862.145.000	0	40%	13.862.145.000	40%	0	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
			IKK1.2	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	90%	90%	100%	18.000.000.000	0%	90%	18.000.000.000	90%	0	-	-	Seksi LLJSDP
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIRAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANGJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	7.077.338.700	31,18%	10	7.077.338.641	10	31,18%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	25	25	100%	916.658.400	27,35%	25	916.658.309	25	27,35%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	10%	10%	100%	7.077.338.700	31,18%	10%	7.077.338.641	10%	31,18%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	7.077.338.700	31,18%	0	7.077.338.641	10	31,18%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	25	25	100%	916.658.400	27,35%	25	916.658.309	25	27,35%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	20%	20%	100%	34.289.371.000	100%	20%	34.289.371.000	20	0	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Dijen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	10%	29%	2.780.706.000	25,75%	10%	2.780.705.585	10	25,75%	Operasional sudah berjalan namun persentase pelanggaran minim	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	0	0%	0	0	0%	0	300.000.000	0	100%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	Seksi LLJSDP
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	80	94%	2.686.232.500	32,84%	80	2.686.232.451	80	32,84%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Dijen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	80	94%	18.272.524.500	41,77%	80	18.272.524.411	80	41,77%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDUKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN MEI				REALISASI BULAN MEI		% CAPAIAN BULAN MEI		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN					
								VOLUME	%	VOLUME	%								VOLUME	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	40%	40%	100%	13.862.145.000	0	40%	13.862.145.000	40%	0	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
			IKK1.2	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	90%	90%	100%	3.564.595.000	19,80%	90%	3.564.595.200	90%	19,80%	-	-	Seksi LLJSDP
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	8.877.465.800	39,11%	10	8.877.465.771	10	39,11%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	25	25	100%	1.130.155.000	33,72%	25	1.130.154.950	25	33,72%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	10%	10%	100%	8.877.465.800	39,11%	10%	8.877.465.771	10%	39,11%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	8.877.465.800	39,11%	0	8.877.465.771	10	39,11%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	25	25	100%	1.130.155.000	33,72%	25	1.130.154.950	25	33,72%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	20%	20%	100%	2.049.300.000	5,40%	20%	2.049.300.000	20	5,40%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	10%	29%	3.484.303.600	32,27%	10%	3.484.303.647	10	32,27%	Operasional sudah berjalan namun presentase pelanggaran minim	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	0	0%	0	0	0%	0	300.000.000	0	100%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	Seksi LLJSDP
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	80	94%	2.950.117.400	36,06%	80	2.950.117.395	80	36,06%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	80	94%	21.714.692.900	49,64%	80	21.714.692.886	80	49,64%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDUKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN MEI				REALISASI BULAN MEI		% CAPAIAN BULAN MEI		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN					
								VOLUME	%	VOLUME	%								VOLUME	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	40%	40%	100%	13.862.145.000	0	40%	13.862.145.000	40%	0	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
			IKK1.2	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	90%	90%	100%	3.564.595.000	19,80%	90%	3.564.595.200	90%	19,80%	-	-	Seksi LLJSDP
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	8.877.465.800	39,11%	10	8.877.465.771	10	39,11%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	25	25	100%	1.130.155.000	33,72%	25	1.130.154.950	25	33,72%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	10%	10%	100%	8.877.465.800	39,11%	10%	8.877.465.771	10%	39,11%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	8.877.465.800	39,11%	0	8.877.465.771	10	39,11%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	25	25	100%	1.130.155.000	33,72%	25	1.130.154.950	25	33,72%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	20%	20%	100%	2.049.300.000	5,40%	20%	2.049.300.000	20	5,40%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	10%	29%	3.484.303.600	32,27%	10%	3.484.303.647	10	32,27%	Operasional sudah berjalan namun presentase pelanggaran minim	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	0	0%	0	0	0%	0	300.000.000	0	100%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	Seksi LLJSDP
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	80	94%	2.950.117.400	36,06%	80	2.950.117.395	80	36,06%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	80	94%	21.714.692.900	49,64%	80	21.714.692.886	80	49,64%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN JUNI				REALISASI BULAN JUNI		% CAPAIAN BULAN JUNI		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN					
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	25%	25%	13.576.240.800	97,94%	25%	13.576.240.798	25%	97,94%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	100%	25%	25%	17.840.056.000	99,11%	50%	17.840.056.000	50%	99,11%	-	-	Seksi LLJSDP
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	11.463.796.200	50,51%	10	11.463.796.176	10	50,51%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	1.430.590.200	42,68%	15	1.430.590.204	15	42,68%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	75%	75%	11.463.796.200	50,51%	75%	11.463.796.176	75%	50,51%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100	75	75%	11.463.796.200	50,51%	75	11.463.796.176	75	50,51%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100	75	75%	1.430.590.200	42,68%	75	1.430.590.204	75	42,68%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	60%	67%	25.978.000.000	68,49%	60%	25.978.000.000	60	68,49%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	15%	43%	4.246.733.500	39,33%	15%	4.246.733.480	15	39,33%	Operasional sudah berjalan namun presentase pelanggaran minim	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	100	0%	0	0	0%	0	300.000.000	0	100%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	Seksi LLJSDP
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	80	94%	3.613.704.800	44,17%	80	3.613.704.863	80	44,17%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	80	94%	30.848.170.500	66,88%	80	30.848.170.543	80	66,88%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERILAKUAN MINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET OUTPUT JKT				RENCANA ANGGARAN JKT				% CAPAIAN ANGGARAN JKT		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN					
								VOLUME	%	VOLUME	%									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	SK1	Memangkatnya keselamatan transportasi darat dan integrasi dan sinkronisasi transportasi	IKK1.1	Perentase pelaksanaan kegiatan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	60%	60%	13 576 240,796	97,94%	60%	13 862 145 000	60%	97,94%	Kegiatan sudah berjalan namun pemecatan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pemecatan	Sekeloa Sarana
			IKK1.5	Perentase pelaksanaan kegiatan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	100%	60%	60%	17 840 056 000	99,11%	60%	17 840 056 000	60%	99,11%	Kegiatan sudah berjalan namun pemecatan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pemecatan	Sekeloa ILUSD
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA BANJAR 2.TTA TASIK 3.TTA GARUT 4.TTA SUMEDANG 5.TTA CIAMPEK 6.TTA CIBEBON 7.TTA KUNINGAN 8.TTA SUBANG 9.TTA SUKABUMI 10.TTA LEUWIPANJANG Perencanaan	Terminal Tipe-A di lokasi	10	10	100%	11 463,796 176	57,62%	10	11 463,796 176	10	57,62%	Kegiatan sudah berjalan namun pemecatan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pemecatan	Sekeloa Prasarana
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyelenggaraan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyelenggaraan Beroperasi	15	15	100%	1 430 590 204	48,27%	15	1 430 590 204	15	48,27%	Kegiatan sudah berjalan namun pemecatan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pemecatan	Sekeloa Prasarana
2	SK2	Memangkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Perentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe A	%	100	Pada Terminal Tipe A Jawa Barat	Terminal Tipe-A di lokasi	100%	75%	75%	11 463,796 176	57,62%	75%	11 463,796 176	75%	57,62%	Kegiatan sudah berjalan namun pemecatan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pemecatan	Sekeloa Prasarana
			IKK2.2	Perentase penerapan SMART terminal tipe A	%	100	Pada Terminal Tipe A Jawa Barat	Terminal Tipe-A di lokasi	100%	75%	75%	11 463,796 176	57,62%	75%	11 463,796 176	75%	57,62%	Kegiatan sudah berjalan namun pemecatan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pemecatan	Sekeloa Prasarana
			IKK2.3	Perentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyelenggaraan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyelenggaraan Beroperasi	100%	75%	75%	1 430 590 204	48,27%	75%	1 430 590 204	75%	48,27%	Kegiatan sudah berjalan namun pemecatan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pemecatan	Sekeloa Prasarana
3	SK4	Memangkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Perentase keselamatan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Tipe kerangka di Daerah Jawa Barat	Perengkapan Jalan	90%	60%	67%	24 358 182 556	54,10%	60%	24 358 182 556	60%	54,10%	Kegiatan sudah berjalan namun pemecatan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pemecatan	Sekeloa ILUSD
			IKK3.2	Perentase pelayanan pada UPPKB Diagon Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelaksanaan pada UPPKB	35%	15%	43%	4 246,933 480	44,55%	15%	4 246,933 480	15%	44,55%	Operasional sudah berjalan namun pemecatan anggaran masih berjalan	Operasional akan ditingkatkan	Sekeloa ILUSD
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang terakomodasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	100%	0%	0	0	0%	0	350 000 000	0	0%	Kegiatan akan dilaksanakan Pada Bulan September	Akan dilaksanakan Bulan September	Sekeloa ILUSD
4	SK5	Memangkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pelajar Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan pelayanan Pelajar Transportasi Darat	Nilai	85	Pemasokan dan Bantuan serta Pelayanan Tipe A Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemasokan dan Bantuan serta Pelayanan Tipe A Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	85	80	94%	3 613,070 4 863	52,92%	80	3 613,070 4 863	80	52,92%	Kegiatan sudah berjalan namun pemecatan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pemecatan	TU
5	SK6	Memangkatnya Efisiensi Digen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tagihan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perencanaan Digen Perhubungan Darat	Nilai	85	Pengukuran Kualitas penyelenggaraan perencanaan	Layanan Perencanaan, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Penyelenggaraan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	80	94%	30 848 170 500	66,88%	80	18 272 524 411	80	66,88%	Kegiatan sudah berjalan namun pemecatan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pemecatan	TU

Bandung, 2 Agustus 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat



MUTIAWATI FERMI, S.T., M.M.,
Pembina TKJ (III/4)
NP. 19800724-2009041-001



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDUKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN AGUSTUS				REALISASI BULAN AGUSTUS		% CAPAIAN BULAN AGUSTUS		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN					
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	70%	70%	10.309.779.433	74.37%	70%	10.309.779.433	70%	74.37%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
			IKK1.2	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	100%	70%	70%	16.188.081.600	89.93%	70%	16.188.081.600	70%	89.93%	-	-	Seksi LLJSDP
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	21.173.146.480	69.31%	10	21.173.146.480	10	69.31%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	2.037.855.014	60,79%	15	2.037.855.014	15	60,79%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	80%	80%	21.173.146.480	69.31%	80%	21.173.146.480	80%	69.31%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	80%	80%	21.173.146.480	69.31%	80%	21.173.146.480	80%	69.31%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	80%	80%	2.037.855.014	60,79%	80%	2.037.855.014	80%	60,79%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	65%	72%	26.396.796.248	69.60%	65%	26.396.796.248	65%	69.60%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	20%	57%	5.949.211.611	55,09%	20%	5.949.211.611	20%	55,09%	Operasional sudah berjalan namun presentase pelanggaran minim	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	100%	0%	0	0	0%	0	350.000.000	0	0%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	Seksi LLJSDP
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	80	94%	2.686.232.500	32,84%	80	2.686.232.451	80	32,84%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	80	94%	18.272.524.500	41,77%	80	18.272.524.411	80	41,77%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU

Bandung, 4 September 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat


Penata TKI (III/d)
NIP. 19800724 200604 1 001



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN SEPTEMBER				REALISASI BULAN SEPTEMBER		% CAPAIAN BULAN SEPTEMBER		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpulan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperluan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	75%	75%	4.209.081.636	30,36%	75%	4.209.081.636	75%	30,36%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan keperluan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	100%	75%	75%	8.756.573.421	48,65%	75%	8.756.573.421	75%	48,65%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASEK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIBERON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKARAME 10.TTA.LEUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	15.389.780.587	67,80%	10	15.389.780.587	10	67,80%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Damau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	2.200.795.979	65,66%	15	2.200.795.979	15	65,66%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
2	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	85%	85%	15.389.780.587	67,80%	85%	15.389.780.587	85%	67,80%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	85%	85%	15.389.780.587	67,80%	85%	15.389.780.587	85%	67,80%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Damau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	85%	85%	2.200.795.979	65,66%	85%	2.200.795.979	85%	65,66%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK2.4	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Damau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	85%	85%	2.200.795.979	65,66%	85%	2.200.795.979	85%	65,66%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
3	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perengkapan Jalan	90%	70%	78%	26.544.336.312	69,98%	70%	26.544.336.312	70%	69,98%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Diagen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	21%	60%	6.367.091.967	58,96%	21%	6.367.091.967	21%	58,96%	Operasional sudah berjalan namun persentase pelanggaran minim	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	100%	100%	100%	350.000.000	100%	100%	350.000.000	100%	100%	Kegiatan akan di laksanakan Pada Bulan Oktober	Akan di Laksanakan Bulan September	Seksi LLJSDP
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tugaski Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	80	94%	5.745.729.418	64,96%	80	5.745.729.418	80	64,96%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6 Meningkatkan Birokrasi Diagen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Diagen Perhubungan Darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transporasi Darat	85	80	94%	38.481.413.667	66,88%	80	38.481.413.667	80	66,88%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU

Bandung, 2 Oktober 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat

Husnu Kholis I. A Md LLAJ, S.Sos., S.H., M.M.
Pemuka (III/d)
NIP. 19670516 198903 1 012



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN OKTOBER				REALISASI BULAN OKTOBER		% CAPAIAN BULAN OKTOBER		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT VOLUME	REALISASI ANGGARAN VOLUME	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
								VOLUME	%	VOLUME	%							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	SK1 Meningkatkan kualitas transportasi darat dan keterpulan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperluan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	80%	80%	6.393.448.954	46.12%	80%	6.393.448.954	80%	46.12%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan keperluan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	100%	80%	80%	10.959.090.421	60.88%	80%	10.959.090.421	80%	60.88%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASEK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIBERON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKARAME 10.TTA.LEUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	24.686.220.363	77.61%	10	24.686.220.363	10	77.61%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Damau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	2.696.316.309	80,44%	15	2.696.316.309	15	80,44%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
2	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	85%	85%	24.686.220.363	77.61%	85%	24.686.220.363	85%	77.61%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	85%	85%	24.686.220.363	77.61%	85%	24.686.220.363	85%	77.61%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Damau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	85%	85%	2.696.316.309	80,44%	85%	2.696.316.309	85%	80,44%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK2.4 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	85%	85%	24.686.220.363	77.61%	85%	24.686.220.363	85%	77.61%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
3	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	70%	78%	34.527.556.312	91.03%	70%	34.527.556.312	70%	91.03%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Diagen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	21%	60%	8.075.772.415	74,78%	21%	8.075.772.415	21%	74,78%	Operasional sudah berjalan namun persentase pelanggaran masih	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	100%	100%	100%	350.000.000	100%	100%	350.000.000	100%	100%	Kegiatan akan dilaksanakan Pada Bulan Oktober	Akan di Laksanakan Bulan September	Seksi LLJSDP
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tugaski Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	85	100%	7.292.282.619	78,24%	85	7.292.282.619	85	78,24%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6 Meningkatkan Birokrasi Diagen Perhubungan Darat	IKK6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Diagen Perhubungan Darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transmigrasi Darat	85	85	100%	44.948.819.877	97,73%	85	44.948.819.877	85	97,73%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU

Bandung, 4 November 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat

Husnu Kelana I. A Md LLAJ, S.Sos., S.H., M.M.
Pemuka (III/d)
NIP. 19670516 198903 1 012



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERAKSIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA SALAH PERANGKAT TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SARAFAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN November				REALISASI BULAN November		% CAPAIAN BULAN November		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PEHANGGUNG JAWAB
								TARGET OUTPUT	TARGET ANGGARAN	REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	BK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpakaian antar moda transportasi	BK1.1 Persentase pelaksanaan keprifitekaan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Prioritas (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Prioritas	100%	85%	85%	7.425.747.389	46,12%	85%	7.425.747.389	85%	76,29%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Sarana
		BK1.5 Persentase pelaksanaan keprifitekaan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Prioritas (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	100%	85%	85%	13.367.431.919	60,88%	85%	13.367.431.919	85%	82,86%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai LJJSDP
		BK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA BANJAR 2.TTA TASIK 3.TTA GARUT 4.TTA SUMEDANG 5.TTA CIAMPEK 6.TTA CIBERONG 7.TTA KUNINGAN 8.TTA SUBANG 9.TTA SUKAREM 10.TTA LEBUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	25.098.544.972	77,61%	10	25.098.544.972	10	85,20%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana
		BK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyelenggaraan Sungai Danau & Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyelenggaraan Beroperasi	15	15	100%	3.352.202.911	80,44%	15	3.352.202.911	15	95,63%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana
2	BK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	BK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	90%	90%	25.098.544.972	77,61%	90%	25.098.544.972	90%	85,20%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana
		BK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	85%	85%	25.098.544.972	77,61%	90%	25.098.544.972	90%	85,20%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana
		BK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyelenggaraan Sungai Danau & Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyelenggaraan Beroperasi	100%	90%	90%	3.352.202.911	80,44%	90%	3.352.202.911	90%	95,63%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana
3	BK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	BK4.1 Persentase pengalangan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Pengalangan Jalan	90%	75%	83%	36.953.659.312	91,10%	75%	36.953.659.312	75%	91,10%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai LJJSDP
		BK4.2 Persentase pengalangan pada UPPKB Diagen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pengalangan pada UPPKB	35%	26%	74%	9.561.897.364	74,78%	26%	9.561.897.364	26%	88,18%	Operasional sudah berjalan namun persentase pengalangan masih	Operasional akan ditingkatkan	Sekai LJJSDP
		BK4.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	100%	100%	100%	350.000.000	100%	100%	350.000.000	100%	100%	Kegiatan akan di laksanakan Pada Bulan Oktober	Akan di Laksanakan Bulan September	Sekai LJJSDP
4	BK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	BK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Topikal Direktorat Jendral Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	85	100%	8.224.837.791	77,32%	85	8.224.837.791	85	77,32%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	BK6 Meningkatkan Efisiensi Diagen Perhubungan Darat	BK6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perencanaan Diagen Perhubungan Darat	Nilai	85	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, HRM, dan Umum Transportasi Darat		85	85	100%	49.105.691.286	95,00%	85	49.105.691.286	85	95,00%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU

Bandung, 4 Desember 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat

Husnu Mulya L A W I L A J , S.Sos., S.H., N.M.
Pembinu III/3
NIP. 19670516 198903 1 012



MONITORING ATAS BENCANA AKSI ATAS PERJAKSIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA SALAH PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SARANAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN DESEMBER				REALISASI BULAN DESEMBER		% CAPAIAN BULAN DESEMBER		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB				
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT		REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN OUTPUT		CAPAIAN ANGGARAN	
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%				VOLUME	%	VOLUME	%
1	BK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	BK1.1	Persentase pelaksanaan keprifitekaan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Prioritas (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Prioritas	90%	90%	100%	9.733.268.000	100,00%	90%	9.733.268.000	90%	100%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Sarana			
		BK1.5	Persentase pelaksanaan keprifitekaan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Prioritas (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	90%	90%	100%	16.132.728.000	100%	90%	16.132.728.000	90%	1	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai LJJSDP			
		BK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA BANJAR 2.TTA TASIK 3.TTA GARUT 4.TTA SUMEDANG 5.TTA CIAMPEK 6.TTA CIBERONG 7.TTA KUNINGAS 8.TTA SUBANG 9.TTA SUKAREM 10.TTA LEBUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	29.458.610.000	98,74%	10	29.458.610.000	10	85,20%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana			
		BK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau & Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	3.505.207.000	99,99%	15	3.505.207.000	15	95,63%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana			
		BK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	100%	100%	29.458.610.000	98,74%	100%	29.458.610.000	100%	85,20%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana			
2	BK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	BK2.2	Persentase pencapaian BMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	85%	85%	29.458.610.000	98,74%	100%	29.458.610.000	100%	85,20%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana			
		BK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau & Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	100%	100%	3.505.207.000	99,99%	100%	3.505.207.000	100%	95,63%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana			
		BK3.1	Persentase peringkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Peringkapan Jalan	90%	90%	100%	40.564.041.000	99,99%	90%	40.564.041.000	90%	99,99%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai LJJSDP			
		BK3.2	Persentase pelayanan pada UPPKSD (Dipen Perhubungan Darat)	%	35%	Pada UPPKSD Aktif di Jawa Barat	Pelayanan pada UPPKSD	35%	35%	100%	10.844.049.000	99,98%	35%	10.844.049.000	35%	88,18%	Operasional sudah berjalan namun persentase pelayanan masih	Operasional akan ditingkatkan	Sekai LJJSDP			
		BK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	100%	100%	100%	350.000.000	100%	100%	350.000.000	100%	100%	Kegiatan akan dilaksanakan Pada Bulan Oktober	Akan di Laksanakan Bulan September	Sekai LJJSDP			
3	BK3 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	BK3.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Topikal Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	85	100%	10.637.426.000	99,99%	85	10.637.426.000	85	99,99%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU			
4	BK6 Meningkatkan Efisiensi Biaya Perhubungan Darat	BK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Pelaksanaan Dipro Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengukuran Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	85	100%	50.114.111.000	99,88%	85	49.105.691.284	85	99,88%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU			
5	BK6 Meningkatkan Efisiensi Biaya Perhubungan Darat	BK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Pelaksanaan Dipro Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengukuran Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	85	100%	50.114.111.000	99,88%	85	49.105.691.284	85	99,88%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU			

Bandung, 5 Desember 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat

Hendra Salsana LAMALLAH, S.Sos, S.H., M.M.
Pencapaian 100%
NIP. 19670516 198903 1 012